



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS BELANJA DAN KINERJA PELAYANAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR
(TAHUN 2006-2009)**

SKRIPSI



**OKKY PRASETIAWAN
06 151 116**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

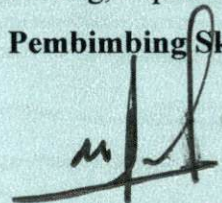
Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : **OKKY PRASETIAWAN**
No.BP : **06 151 116**
Program Studi : **S - 1**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Judul Skripsi : **Analisis Belanja dan Kinerja Pelayanan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
(tahun 2006-2009)**

Telah diseminarkan pada tanggal 31 Agustus 2010 dan telah disetujui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Padang, April 2011

Pembimbing Skripsi



Drs. Masrizal, M.Soc. Sc

NIP. 195802111987021003

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Andalas

Dr.H.Syafuruddin Karimi, SE,MA
NIP. 195410091980121001

Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing
NIP. 130.812.952

HALAMAN PERSEMBAHAN



"Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu Yang Menciptakan.

Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah.

Bacalah, Dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah.

Yang Mengajarkan Manusia Dengan Perantaraan Kalam (Pena).

Dia, Allah, Mengajarkan Kepada Manusia Apa Yang Tidak Diketahuinya."

(AL-QUR'AN SURAT AL-ALAQ AYAT 1-5)

*"Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mencapai tingkatan orang shalih
sebelum kamu melalui enam jalan, yaitu :*

Pertama, tutuplah pintu kesenangan dan bukalah pintu kesungguhan.

Kedua, tutuplah pintu kesombongan dan bukalah pintu kerendahan (hati).

Ketiga, tutuplah pintu bersantai dan bukalah pintu perjuangan.

Keempat, tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu bangun malam.

Kelima, tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan.

Keenam, tutuplah pintu khayalan dan bukalah pint persiapan kematian."

(ABRAHIM BIN ADHAM)

Karya kecil ini persembahkan untuk :

ALLAH S.W.T, Raja Alam Semesta.

Muhammad SAW Utusan ALLAH si-Penyempurna Akhlaq.

Bunda Sulastri, Darah, Air Mata, Air Susu, dan Keringatnya Ada Ditubuhku.

Ayahanda Syaiful Asmal, Sabar dan Teguh-mu Menjadi Kekuatan Buatku.

Kakanda Stephanie Ayutri dan Adinda Agit Mahadithya.

Kekasihku Diah Rahmawati Yang Menyentuh Raga Ini Dengan Lemari Hati.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program studi Ilmu Ekonomi FE UA. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku“

Padang, April 2011

Penulis,



Okky Prasetiawan

No. Alumni Universitas	OKKY PRASETIAWAN	No. Alumni Fakultas
BIODATA		
a) Tempat/tanggal lahir : Balai Tengah / 13 Maret 1988 b) Nama Orang Tua : Syaiful Asmal & Sulastri c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151116 f) Tanggal Lulus : 31 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,23 i) Lama Studi : 4 tahun h) Alamat Orang Tua : Jln. Simpurut No.29 Kenagarian Simpurut , Kec. Sungai Tarab, Tanah Datar		

Analisis Belanja dan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (tahun 2006-2009)


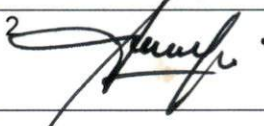
Skripsi S1 oleh: Okky Prasetiawan Pembimbing Skripsi: Drs. Masrizal, M.Soc, Sc

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang anggaran belanja dinas kesehatan dan kinerja pelayanan kesehatan didasarkan anggaran belanja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi belanja dan juga untuk mengetahui kemampuan dinas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yakni metode untuk melihat gambaran pencapaian kinerja pelayanan pada bidang kesehatan. Alat analisis yang dipakai adalah realisasi belanja dan kinerja pelayanan masing-masing pada bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Data yang digunakan adalah data tahunan anggaran belanja dinas kesehatan, data tahunan jumlah penduduk, balita, rumah sakit, puskesmas dan pustu, posyandu, tenaga kesehatan, dokter, dan bayi di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan anggaran setiap tahunnya berbanding terbalik dengan kinerja pelayanan dinas kesehatan atau terdapat hubungan yang negatif antara terdapat pengaruh yang negatif antara selisih logaritma jumlah uang beredar Indonesia dengan Amerika terhadap nilai tukar dolar, terdapat hubungan yang negatif antara selisih logaritma suku bunga Amerika dengan Indonesia terhadap nilai tukar dolar dan pengaruh yang positif antara selisih keduanya. Oleh sebab itu, pemerintah Tanah Datar diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengalokasian anggaran belanja agar kenaikan anggaran belanja sejalan dengan meningkatnya kinerja pelayanan dinas kesehatan di Kabupaten Tanah Datar.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 31 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3.
Nama Terang	Drs. Masrizal, M.Soc. Sc	Drs. Amra Ausri	Fery Andrianus, S.E, M.Si

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS BELANJA DAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR (TAHUN 2006-2009)”.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Andalas Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna mengoreksi dan memperbaiki atas kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa terselesaikan dengan baik. sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Masrizal, Drs, M.Soc, Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Syafruddin Karimi, Dr., H., SE., MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Firwan Tan, Prof., Dr., H., SE., M.Ec., DEA., Ing., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

4. Febriyandi Prima Putra, SE., M.Si. Selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Alm. Syahrudin, Prof., Dr., H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Orang tua dan saudara-saudaraku serta keluarga besarku (thank untuk semuanya) yang memberikan dukungan moril dan materiil sampai selesainya skripsi ini.
7. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
8. Teman-teman EP 2006 (Roni, Yopi, Surya, Novi, Deni, Okky Mus, Ridhwan, Usri, Nanang, Viki, Da Pendi dan masih banyak lagi...) Friendship For Ever!!!
9. My Soul, Diah Rahmawati, "Lets Get Our Dream", kelembutan hati dan halus tutur kata-mu adalah semangat ku dalam melangkah.
10. Rekan – rekan seperjuangan (Satria, Adheck, Aulia, Beni,).
11. Anak-anak KKN Pulasan, Dori (sang ketua), Ade, Da An, Eko, Andi, Ridhwan, Dila, Riza, Disa, Tania, Meta, Ina, Mila, dll thanks buat semua keGilaannya.
12. Teman-teman Kosan Hijau dan Kosan Surya (Bg Fae, Bg Viki, Rian, Jepri, Ifnul, Yudha, Ajo, Fran) thanks buat dukungannya.
13. Semua pihak yang telah membantu baik selama penulis menjalani kuliah maupun saat menulis skripsi, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhirnya penuls ucapkan sekali lagi terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, semoga budi baik menjadi tabungan di akhirat kelak.

“Sampaikan kabar gembira bagi mereka yang mendengarkan perkataan (kebaikan dan kebenaran) lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka inilah orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang yang berakal (ulul albab), (QS Az-Zumar, 17-18).”

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah	7
2.1.1. Pengertian APBD.....	7
2.1.2. Fungsi APBD	8
2.1.3. Struktur APBD	9
2.1.4. Anggaran Berbasis Kinerja	16
2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	18
2.2.1. Pengertian Kinerja	18

2.2.2. Indikator Kinerja.....	18
2.2.3. Pengukuran Kinerja.....	19
2.2.4. Pengukuran Kinerja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.....	21
2.3. Orientasi Pembangunan Dinas Kesehatan.....	23
2.4. Tinjauan Literatur.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Data dan Sumber Data	
3.1.1. Jenis Data.....	27
3.1.2. Sumber Data.....	27
3.2. Metode Pengumpulan Data	28
3.3. Defenisi Operasional Indikator.....	28
3.4. Metode Penelitian.....	30
3.5. Metode Analisis.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1. Kondisi Geografis.....	33
4.2. Tofografi dan Iklim.....	33
4.3. Demografi.....	34
4.4. Kependudukan.....	36
4.5. Kondisi Ekonomi.....	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Belanja.....	42
5.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan.....	42
5.2. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pada Tahun 2006-2009 ..	47

5.3. Realisasi Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Pelayanan	
Dinas Kesehatan.....	51
5.4. Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian.....	54

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	57
6.2. Keterbatasan Dan Saran Penelitian.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Keadaan Demografi Kabupaten Tanah Datar 2009	35
Tabel 4.2.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009	37
Tabel 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar 2005-2009.....	39
Tabel 4.4	PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar 2005-2009	40
Tabel 5.1.	Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009	42
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009	44
Tabel 5.3.	Rekapitulasi Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Ringkasan Perhitungan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2006
- Lampiran II Ringkasan Perhitungan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2007
- Lampiran II Ringkasan Perhitungan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2008
- Lampiran II Ringkasan Perhitungan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab dan diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Miewald dan Pamudji “Sentralisasi dan desentralisasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, pada dasarnya berkenaan dengan “*delegation of authority*” yang dapat diukur dari sejauh mana unit- unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan”. (Widodo 2001)

Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan publik dari pemerintahan pusat

dalam bentuk regulasi bukanlah suatu cara yang menjamin adanya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dan menjamin adanya kehematan dalam pengelolaan belanja bila regulasi yang dikeluarkan tidak secara tegas dan transparan mampu mengatur seluruh aspek pengelolaan keuangan. Dengan bergulirnya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 2 menjelaskan tentang perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan jaminan sosial.

Untuk melihat apakah pemerintah daerah berhasil atau gagal menjalankan otonomi daerah maka perlu diadakan suatu penilaian untuk itu. Sehubungan dengan hal itu Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Evaluasi Kinerja Otonomi Daerah yang merupakan pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2008 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Februari 2008.

Kabupaten Tanah Datar menjadi satu dari empat daerah di Indonesia yang dinilai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai yang paling berprestasi dan berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah, hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dihasilkan oleh Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2000-2004, mulai dari sistem standar pelayanan publik yang optimal sampai pada meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar dari 1,7 miliar rupiah pada tahun 2000 menjadi 15 miliar pada tahun 2004, atau terjadi peningkatan sebesar 850 persen (Kompas (2004). Peningkatan PAD yang begitu besar akan berdampak pada anggaran yang

dianggarkan bagi tiap-tiap dinas salah satunya Dinas Kesehatan.

Bukan hanya pada tahun 2000-2004 saja terjadi peningkatan anggaran belanja kesehatan, pada tahun 2006-2009 juga terjadi peningkatan anggaran belanja kesehatan Kabupaten Tanah Datar yakni sebesar Rp.29.211.235.700,- tahun 2006 terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2009 yakni sudah sebesar Rp.33.911.840.455,-. Peningkatan anggaran belanja dinas kesehatan ini jika dilihat secara umum meningkatkan kinerja pelayanan dinas kesehatan hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase balita gizi buruk dari 0,19% pada tahun 2008 menjadi 0,10% pada 2009 dengan anggaran sebesar Rp.32.895.958.087,- tahun 2008 dan Rp.33.911.840.455,-, begitu juga dengan peningkatan rasio posyandu per satuan balita dari 16,330% tahun 2008 menjadi 20,811% pada tahun 2009, hal yang sama juga terjadi pada rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk, meningkat dari 1,475% tahun 2008 menjadi 1,679% pada tahun 2009. Dan rasio dokter persatuan penduduk juga mengalami peningkatan dari 0,178% tahun 2008 menjadi 0,246% pada tahun 2009.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah dalam usahanya mencapai tujuan otonomi daerah, antara lain dilakukan oleh Prasojo, Kurniawan, dan Hasan (2005); Steer (2005); Sukarna, Budiningsih, dan Riyarto (2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasojo, Kurniawan dan Hasan (2005) bahwa kunci semua keberhasilan dalam pelaksanaan program-program inovasi di kabupaten Jembrana adalah adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana khususnya Bupati untuk selalu meningkatkan perbaikan pelayanan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran dalam semua sektor pembangunan.

Steer (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur selalu berada dibawah rata-rata nasional. Walaupun ada dana otonomi khusus namun penganggaran lebih difokuskan untuk belanja rutin sehingga belanja pelayanan tetap terabaikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Analisis Belanja Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.
2. Bagaimanakah kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.
2. Untuk mengetahui kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah

Datar Tahun 2006-2009.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengalokasian belanja dan penilaian kinerja di masa yang akan datang.
2. Bagi pembaca penelitian ini, sebagai informasi dalam menilai pengalokasian belanja dan penilaian kinerja pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.
3. Bagi Penulis, penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam mempraktekkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Analisis dalam penelitian ini dibatasi hanya pada alokasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar.
2. Data yang digunakan adalah data *sekunder* tahunan dari tahun 2006-2009.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang otonomi daerah, APBD, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan tolak ukur kinerja dinas kesehatan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran lokasi dimana penelitian ini dilakukan baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang dilakukan serta implikasi kebijakan dari penelitian tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Menurut UU No. 33 tahun 2004, "Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD". Menurut Saragih (2003), "APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)".

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah

anggaran belanja yang telah ditetapkan (*overspending*). Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2 Fungsi APBD

Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2002), mengungkapkan ada beberapa fungsi utama anggaran sektor publik yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)
8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*)

Sedangkan Bastian (2006) mengungkapkan fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana-rencana kerja

2. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dengan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

2.1.3 Struktur APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari: anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan. Anggaran pendapatan merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Anggaran belanja meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2002) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam

periode tahun anggaran bersangkutan. Secara umum pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Bagian Laba Usaha Daerah
- 4) Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan dipisahkan menjadi tiga jenis :

- 1) Dana Alokasi Umum
- 2) Dana Alokasi Khusus
- 3) Dana Bagi Hasil

c. Lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari :

- 1) Hibah
- 2) Dana Darurat

- 3) Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- 4) Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
- 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 “Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja daerah terbagi dua, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih terinci lagi pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

- a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- b. Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- c. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
- d. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemda lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntuknya.
- e. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang kesehatan
- f. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah

2. Belanja Langsung

- a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan

pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus pada hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c. Belanja modal adalah belanja untuk menghasilkan aset yang manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan. Halim (2007) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja modal adalah :

- 1) Belanja tanah
- 2) Belanja peralatan dan mesin
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan
- 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
- 5) Belanja aset tetap lainnya

6) Belanja aset lainnya

Sedangkan menurut Abdullah (2008) belanja modal adalah belanja yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memnfaatkan surplus anggaran. Menurut Halim (2007) anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto.

a. Penerimaan Pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Kelompok pembiayaan ini terdiri dari :

- 1) Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6) Penerimaan Piutang Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk pengalokasian surplus anggaran. Kelompok pembiayaan ini terdiri dari :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal pemerintah Daerah
- 3) Pembayaran Utang Pokok
- 4) Pemberian Pinjaman

c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah setelah di kurangi pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mercer (2002) dalam Kumorotomo (2008) anggaran kinerja adalah sistem menekankan antara keterkaitan antara pendanaan dengan hasil-hasil yang di capai ; *A performance budget is an integrated annual performance plan and annual budget that shows the relationship between program funding levels and expected result. It indicates that a goal or a set of goals should be achieved at a given level of spending.* Secara ideal, anggaran kinerja akan dapat meningkatkan prestasi jajaran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi atau pelayanan publik.

Anggaran berbasis kinerja di Indonesia disusun berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat 1 “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”

dan ayat 2 “Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut dengan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Anggaran disusun berdasarkan pertimbangan beban kerja dan unit cost setiap kegiatan.
2. Menitikberatkan pada aspek manajemen strategi dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran untuk optimalisasi output yang dihasilkan dari suatu input (biaya) tertentu.
3. Orientasi tidak hanya Output, tetapi juga Outcome, Benefit dan Impact.
4. Tujuan ditetapkan lebih dahulu. Dalam pelaksanaan menganut sistem transparansi anggaran yang maksudnya tidak hanya sekedar memberikan/menyampaikan informasi tentang anggaran kepada dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini dilaksanakan karena :
 - a. Anggaran bersumber dari masyarakat
 - b. Masyarakat yang tahu dengan kebutuhan pembangunan di daerah mereka
 - c. Sasaran anggaran adalah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Kinerja

Sering kita mendengar ungkapan yang mengatakan “kinerja yang baik dan kinerja yang jelek”, tapi apakah kinerja itu sebenarnya? Pengertian kinerja menurut Wiyono (2007) merupakan sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja (tentang peralatan) atau prestasi yang diperlihatkan. Sedangkan menurut Mahsun (2006) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *Strategic planning* suatu organisasi.

2.2.2 Indikator Kinerja

Dalam menentukan indikator kinerja, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan indikator kinerja. Pendekatan pertama adalah dengan berfokus pada masukan input, output, dan outcome.

Indikator kinerja merupakan ukuran numerik dapat dibandingkan dengan ukuran numerik lainnya untuk menunjukkan status relatif dari berbagai aspek kinerja. Terdapat tiga komponen yang harus melekat pada indikator kinerja tersebut (Akbar, 2007):

- a. Indikator kinerja harus numerik tapi tidak harus selalu berbentuk variabel financial
- b. Indikator kinerja harus digunakan dalam situasi komparasi yang valid
- c. Indikator kinerja harus cukup spesifik sehingga memungkinkan pengelola organisasi melakukan perbaikan kinerja yang diperlukan.

2.2.3 Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur efektifitas kerja suatu organisasi perlu dilakukan pengukuran atas pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan yang dilaksanakan pada organisasi tersebut, namun mengukur kinerja organisasi pemerintahan tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan di organisasi pemerintahan tidak terdapat pengukur kinerja yang sepadan dengan laba untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, tujuan organisasi pemerintah jauh lebih kompleks dan bersifat intangible. Pendapatan Pemerintah Daerah bukanlah merupakan ukuran output entitas Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya indikator kinerja yang tidak berorientasi pada laba (Akbar, 2007). Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Secara sederhana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan beberapa metode sederhana seperti berikut:

- a. Membandingkan rencana program dengan realisasi program
- b. Membandingkan efisiensi program saat ini dengan program tahun lalu
- c. *Benchmarking* dengan program Pemerintah Daerah lainnya
- d. Membandingkan realisasi program dengan standarnya.

Namun secara spesifik pengukuran kinerja di bedakan jadi 2 metode yaitu :

- a. Pengukuran kinerja berdasarkan penilaian kemajuan organisasi

Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan

yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester atau tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih rendah dari periode sebelumnya, maka harus diidentifikasi dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya, Mahsun (2006)

b. Pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran.

Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya *Overspending* atau *Underspending*. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar.

Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih (*variance*) antara anggaran dan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran (*Analysis of Budget Variance*). Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih *Underspending* atau *Overspending*.

Pengawasan/pengendalian dilakukan dengan analisis selisih (*variance analysis*) antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Berdasarkan analisis selisih ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja. Jika selisih terjadi menunjukkan pengeluaran aktual yang lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran (*underspending*), maka berarti kinerja keuangan sebuah satuan kerja adalah baik. Jika terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan kinerja keuangan satuan kerja adalah jelek. Jika dalam tahap pelaksanaan anggaran mengalami perubahan, maka yang dijadikan tolak ukur adalah anggaran setelah mengalami perubahan.

2.2.4 Pengukuran Kinerja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sasaran utama diberlakukannya otonomi daerah adalah supaya daerah dapat mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 memberikan beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah pada daerah yang baru dibentuk.

3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Dalam penelitian ini digunakan masing-masing indikator kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 untuk Dinas Kesehatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Persentase Balita Gizi Buruk

$$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$$

- b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

- c. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Puskesmas dan Pustu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

- d. Rasio Posyandu per Satuan Balita

$$\frac{\text{Jumlah Posyandu}}{\text{Jumlah Balita}} \times 1000$$

- e. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah Peduduk}} \times 1000$$

f. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Dokter}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

g. Angka Kematian Bayi

h. Angka Umur Harapan Hidup

2.3 Orientasi Pembangunan Dinas Kesehatan

Berdasarkan pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengacu pada peraturan di bidang kesehatan,

yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, pemerintah juga bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Dengan begitu pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan antara rumusan visi dan misi daerah dengan alokasi anggarannya.

2.4 Tinjauan Literatur

Prasojo, Kurniawan dan Hasan (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kunci semua keberhasilan dalam pelaksanaan program-program inovasi di kabupaten Jembrana adalah adanya komitmen pemerintah Kabupaten Jembrana

khususnya Bupati untuk selalu meningkatkan perbaikan pelayanan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran dalam semua sektor pembangunan. Program efisiensi anggaran menjadi begitu pentingnya mengingat kemampuan keuangan yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam membiayai program-program inovasi yang cenderung cost centered tersebut. Karenanya, dalam pembiayaan program-program inovasi sangat tergantung dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran di semua sektor pembangunan. Hasil efisiensi tersebut untuk selanjutnya akan digunakan untuk mensubsidi program-program inovasi yang ada.

Steer (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur selalu berada dibawah rata-rata nasional, terutama karena layanan publik tidak menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan termiskin di Papua. Di saat yang sama, ada peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan didorong oleh Dana Otsus, namun prioritas pengeluaran pembangunan pemerintah daerah tidak banyak berubah. Sebagian besar dana APBD di alokasikan untuk pengeluaran rutin, dimana pengeluaran lain-lain mengalami peningkatan secara tidak proporsional.

Sukarna, Budiningsih dan Riyarto (2006) dalam penelitiannya menemukan salah satu resiko desentralisasi, khususnya dari sudut pandang pembiayaan kesehatan terletak pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor kesehatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kemampuan dari Dinas Kesehatan untuk dapat menetapkan prioritas program kesehatan, serta kemampuan advokasi kepada eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan peningkatan alokasi dana

yang sesuai kebutuhan. Dinas Kesehatan Kabupaten Muna tidak mampu mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhannya, karena : SDM perencana belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mengalokasikan anggaran; dana untuk kegiatan penyusunan anggaran, advokasi dan loby tidak mencukupi; sumber data yang berkualitas dan sarana pendukung kegiatan penyusunan anggaran; tidak ada struktur dan kelembagaan yang dapat mengakomodasikan kegiatan pengalokasian anggaran; serta tidak adanya komitmen politik pemda terhadap peningkatan anggaran kesehatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah :

1. Data kualitatif

Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Jenis data kualitatif ini ialah data sekunder yaitu data yang telah mengalami proses pengolahan oleh sumbernya.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar berupa Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.

2. Bappeda Kabupaten Tanah Datar berupa :
 - a. LKPJ Kabupaten Tanah Datar 2006-2009
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Berupa :
 - a. Profil Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009.
 - b. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
4. Badan Pusat Statistik berupa :
 - a. Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2006-2008.
5. Internet dengan mengakses situs-situs yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Field Research (Penelitian Lapangan)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dengan mendatangi dinas terkait.
2. Library Research (Penelitian Perpustakaan)

Data teoritis yang berasal dari studi literatur yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah diatas.

3.3 Defenisi Operasional Indikator

1. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh bayi atau anak dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

2. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

3. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas dan pustu per 1000 penduduk.

4. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan penduduk adalah jumlah posyandu per 1000 balita.

5. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk adalah jumlah tenaga kesehatan per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga kesehatan.

6. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah jumlah dokter per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter.

7. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal saat dilahirkan per 1000 kelahiran hidup.

8. Angka Umur Harapan Hidup

Angka umur harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

3.4 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk melihat gambaran pencapaian kinerja pelayanan pada bidang kesehatan. Alat analisis yang dipakai adalah realisasi belanja dan kinerja pelayanan masing-masing pada bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pengukuran kinerja menggunakan indikator-indikator dibawah ini :

- a. Persentase Balita Gizi Buruk

$$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$$

- b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

- c. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Puskesmas dan Pustu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

- d. Rasio Posyandu per Satuan Balita

$$\frac{\text{Jumlah Posyandu}}{\text{Jumlah Balita}} \times 1000$$

- e. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah Peduduk}} \times 1000$$

- f. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Dokter}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

g. Angka Kematian Bayi

h. Angka Umur Harapan Hidup

Pengukuran dilakukan dengan menganalisa peningkatan kinerja pelayanan masing-masing indikator. Selanjutnya dilakukan penilaian pencapaian kinerja dengan pengukuran kinerja berdasarkan penilaian kemajuan organisasi.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan disini adalah dalam bentuk metode statistik dengan menggunakan indikator-indikator yang diukur.

1. Pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran.

Pengukuran ini dilakukan dengan menilai selisih (*variance*) antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran (*Analysis of Budget Variance*). Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih *Underspending* atau *Overspending*. Selisih *Underspending* adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran yang ditetapkan. Sebaliknya, selisih *Overspending* adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran. Pengawasan/pengendalian dilakukan dengan analisi selisih (*Variance Analysis*) antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Analisis selisih ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja. Jika selisih

terjadi menunjukkan pengeluaran aktual yang lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran (*Underspending*) maka berarti kinerja keuangan sebuah satuan kerja adalah baik. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi *Overspending* maka berarti kinerja keuangan sebuah satuan kerja adalah buruk (Mahsun, 2006).

2. Pengukuran kinerja berdasarkan penilaian kemajuan organisasi.

Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, atau tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya (Mahsun, 2006).

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah wilayah provinsi Sumatera Barat, yang tidak mempunyai akses langsung ke provinsi lain. Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

4.2 Topografi dan Iklim

Kabupaten Tanah Datar dengan luas 1336 km² atau 133600 Ha yang terletak 0⁰19⁰-0⁰30⁰ Lintang Selatan dan 100⁰19⁰-100⁰51⁰ Bujur Timur. Pada umumnya topografi Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah perbukitan, bergunung-gunung dengan kemiringan 15% ke atas. Luas wilayah datar dengan kemiringan 0-3% hanya 6160 (4,61%).

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya. Yang

pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, secara tidak langsung faktor iklim juga mempengaruhi kesehatan.

Hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat curah hujan di Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi, berkisar antara 1.750 – 4000 mm/tahun. Musim hujan yang tinggi berkisar antara bulan september sampai bulan mei, sedangkan musim kemarau berkisar bulan agustus sampai april setiap tahunnya.

4.3 Demografi

Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Datar adalah 348.997 orang. Dari jumlah tersebut 39.891 orang berusia 7-12 Tahun (11,4 %), 19828 orang berusia 13-15 tahun (5,7 %) dan 19.647 berusia 16-18 tahun (5,6%). Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tidak/belum pernah sekolah sebanyak 7.183 orang.
2. Tidak /belum tamat SD sebanyak 70.460 orang.
3. Tamat SD sebanyak 80.356 orang.
4. Tamat SMP sebanyak 58.347 orang.
5. Tamat SLTA sebanyak 50.390 orang.
6. Tamat SMK sebanyak 53.000 orang.
7. Tamat Diploma I dan II sebanyak 18.870 orang.
8. Tamat Diploma III sebanyak 4.416 orang.
9. Tamat sarjana 5.975 orang.

Tabel 4.1
Keadaan Demografi Kabupaten Tanah Datar 2009

No	Komponen	Jumlah
1	Penduduk	348.997
2	Penduduk 7 - 12 Tahun	39.891
3	Penduduk 13 - 15 tahun	19.828
4	penduduk 16 - 18 tahun	19.647
5	Tingkat pendidikan penduduk	348.997
	a. Tidak / belum pernah sekolah	7.183
	b. Tidak atau belum tamat SD	70.46
	c. Tamat SD	80.356
	d. Tamat SLTP	58.347
	e. Tamat SMA	50.39
	f. Tamat SMK	53
	g. Tamat Diploma I/II	18.87
	h. Tamat Diploma III. Sarmud	4.416
	i. Tamat Sarjana	5.975
6	Tingkat Kepandaian Membaca	348.997
	a. Dapat membaca tulis	343.54
	b. Buta huruf	5.457
7	Angkatan Kerja	161.259
	a. Bekerja	148.227
	b. Mencari Pekerjaan	13.032
8	Bukan Angkatan Kerja	75.107
	a. Bersekolah	18.127
	b. Mengurus RT	43.055
	c. Lainnya	13.925
9	Penduduk Miskin (KK)	15.628

Sumber : Tabel, Buku IIB Data dan Verifikasi

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 148.227 orang
2. Jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 13.032 orang
3. Jumlah angkatan kerja 161.259 orang

4. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri dari :
 - a. Bersekolah 18.127 orang
 - b. Jumlah penduduk mengurus rumah tangga 43.055 orang
 - c. Lainnya 13.925 orang

4.4 Kependudukan

Penduduk yang berkualitas merupakan modal dasar untuk kelangsungan pembangunan terutama pembangunan kesehatan. Penduduk yang besar dengan kualitas rendah merupakan beban bagi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan Kabupaten Tanah Datar di arahkan pada pengendalian kualitas, pengembangan kualitas serta pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri karakteristik yang menunjang pembangunan Kabupaten. Dengan jumlah penduduk 348997 jiwa dengan 91093 KK dengan kepadatan penduduk per KM sebanyak 258 jiwa. Bila dilihat dari rata-rata jiwa per rumah tangga maka rata-rata ditemukan 3,88 jiwa per rumah tangga. Dilhat dari rasio beban tanggungan didapatkan sebesar 65,1 berarti kelompok umur tidak produktif masih relatif. Perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 95, sedangkan untuk tingkat pendidikan yang diselesaikan diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan tinggi kelompok perempuan lebih tinggi dari laki-laki karena jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan adanya upaya pemberdayaan yang lebih baik lagi pada perempuan dalam memberikan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pendidikan.

4.5 Kondisi Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan di

bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan di harapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta bidang lainnya secara harmonis.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Tanah Datar, sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian Tanah Datar yang menyumbangkan kontribusi terbesar dengan rata-rata 38,23% selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tanah Datar
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1	Pertanian	38.64	38.48	37.84	38.40	37.77	38.23
2	Pertambangan dan Penggalian	2.00	1.94	1.85	1.82	1.83	1.88
3	Industri Pengolahan	11.29	11.27	11.90	11.67	11.75	11.58
4	Listrik, Gas dan Air bersih	1.06	1.01	1.09	1.02	1.00	1.04
5	Bangunan	7.40	7.59	7.79	7.68	7.90	7.67
6	Perdagangan, Hotel dan Resto	12.47	12.10	11.88	12.26	12.56	12.25
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.58	6.40	6.53	6.57	6.61	6.34
8	Keu., Persewaan dan Jasa Prshn	3.40	3.34	3.39	3.40	3.45	3.40
9	Jasa-jasa	18.16	17.87	17.73	17.18	17.13	17.61
	Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar (diolah)

Kontribusi sektor jasa-jasa di tahun 2009 sebesar 17,13% sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan lebih rendah dari rata-rata kontribusi selama periode lima tahun yakni 17,61 persen. Selain sektor pertanian dan jasa-jasa, sektor yang mempunyai andil yang cukup besar dalam struktur perekonomian Tanah Datar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana pada tahun 2009 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 12,56%, naik 0,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata distribusi persentase selama periode 2005-2009 dengan kontribusi sebesar 12,25%. Hal tersebut dikarenakan situasi bisnis sektor perdagangan cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu.

Selanjutnya sektor industri pengolahan dalam hal ini juga termasuk sektor yang cukup besar memberikan kontribusi dalam struktur perekonomian Tanah Datar. Pada tahun 2009 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 11,75% atau naik sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2008. Namun, sedikit lebih besar dibandingkan rata-rata kontribusi selama lima tahun kebelakang. Selain itu, sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya dalam struktur perekonomian Tanah Datar adalah sektor bangunan. Tahun 2009 kontribusi sektor bangunan dalam memberikan nilai tambah PDRB Tanah Datar adalah sebesar 7,90% dan kontribusinya naik 0,22% dari tahun sebelumnya.

Perkembangan kegiatan ekonomi di sektor pengangkutan dan komunikasi yang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dalam struktur perekonomian Tanah Datar. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2009 memberikan kontribusi

sebesar 6,61%, dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebesar 6,57%. Sementara itu, untuk sektor-sektor lainnya seperti pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan kontribusinya relatif masih dibawah 4% terhadap struktur perekonomian Tanah Datar.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Tanah Datar dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Tanah Datar Tahun 2005-2009

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1	Pertanian	5.85	5.95	6.17	5.58	5.36	5.75
2	Pertambangan dan Penggalian	4.23	4.33	3.15	5.97	5.91	4.72
3	Industri Pengolahan	6.03	6.52	5.80	6.03	5.99	6.07
4	Listrik, Gas dan Air bersih	8.88	9.17	9.05	6.14	6.36	7.92
5	Bangunan	3.98	5.45	3.94	6.34	6.41	5.22
6	Perdagangan, Hotel dan Resto	5.86	6.35	5.58	5.89	5.96	5.93
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.32	6.11	5.33	6.29	7.07	5.82
8	Keu., Persewaan dan Jasa Prshn	5.26	6.98	6.93	6.91	7.07	6.63
9	Jasa-jasa	3.97	4.58	7.36	6.31	5.97	5.64
	Tanah Datar	5.28	5.83	6.05	5.91	5.88	5.79

Sumber : BPS kabupaten Tanah Datar (diolah)

Pada tahun 2009 sebesar 5,88%. Bila dibandingkan tahun 2008 (5,91%) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun (5,79%), akselerasi kinerja perekonomian Tanah Datar sedikit melambat. Tetapi pertumbuhan ekonomi Tanah Datar lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai Propinsi Sumatera Barat hanya mampu tumbuh sebesar 4,16%.

Lambannya laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2009 diakibatkan ada beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang rendah dan relatif melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sedangkan untuk PDRB perkapita dan pendapatan perkapita kabupaten Tanah Datar terus mengalami kenaikan nilai dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat di tabel berikut.

Tabel 4.4

**PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2005-2009**

Uraian	Tahun	Nilai Nominal	Perubahan
		(Rp)	(%)
PDRB Perkapita	2005	8,603,505.62	16.75
	2006	10,076,448.71	17.12
	2007	11,178,234.01	10.93
	2008	12,650,170.93	13.17
	2009	13,902,367.91	9.90
Pendapatan Perkapita	2005	8,225,652.62	18.91
	2006	9,474,759.25	15.19
	2007	10,450,906.28	10.30
	2008	11,824,335.59	13.14
	2009	12,974,281.13	9.73

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Nilai PDRB perkapita tahun 2009 meningkat sebesar 9,90% dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2008 yakni dari Rp. 12,65 juta per orang per tahun pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar Rp. 13,90 juta per orang per tahun 2009. Tingginya nilai PDRB perkapita tersebut secara riil berjumlah menunjukkan peningkatan terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Tanah Datar, karena didalam masih terhadap pengaruh dari tingkat inflasi.

Selanjutnya nilai Pendapatan Perkapita pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Nilai rata-rata pendapatan perkapita dapat menunjukkan perkiraan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah, yang merupakan nilai total PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto, baru dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Perkapita pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp. 12,97 juta atau mengalami peningkatan sebesar 9,73% dibandingkan tahun 2008.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Belanja

Dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar penulis memperoleh data berupa ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006-2009 tentang realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dimana anggaran yang digunakan disini adalah anggaran setelah perubahan. Selanjutnya berdasarkan dari data tersebut, akan diklasifikasikan berdasarkan variabel penelitian yaitu realisasi belanja secara keseluruhan, belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

5.1.1 Realisasi Anggaran Belanja

Berdasarkan ringkasan perhitungan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2006-2009 realisasi seluruh belanja Dinas Kesehatan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran	Realisasi Belanja (%)	Pertumbuhan Realisasi Anggaran
2006	29,211,235,700.00	25,277,804,402.00	86.53	-
2007	28,409,448,059.50	26,325,390,409.00	92.66	3.98
2008	32,895,958,087.20	28,126,483,499.00	85.50	6.40
2009	33,911,840,455.62	31,579,789,419.00	93.12	10.94

Sumber : Ringkasan Perhitungan APBD, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 anggaran belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 29.211.235.700, dengan realisasi anggaran belanja sebesar 86,63%. Pada tahun 2007 anggaran belanja Dinas Kesehatan mengalami penurunan dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 28,409,448,059.50, penurunan anggaran belanja dibandingkan tahun 2006 di akibat oleh ada hal lain yang sangat mendesak untuk dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2007 sehingga alokasi anggaran belanja untuk Dinas Kesehatan ini harus dipangkas dan dialokasikan kepada SKPD lain yang lebih membutuhkan dan terlambatnya pengesahan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pengesahan perubahan APBD baru dilaksanakan pada bulan November, keterlambatan pengesahan APBD mengakibatkan tidak terserapnya seluruh anggaran. Namun pada tahun 2008 dan 2009 kembali mengalami peningkatan. namun anggaran ini dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi anggaran belanja sebesar 92.66%. Pada tahun 2008 anggaran belanja Dinas Kesehatan kembali mengalami kenaikan mencapai angka 32,895,958,087.20, walaupun demikian realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan tidak dapat dimaksimalkan dan hanya terealisasi sebesar 85.50% hal ini menunjukkan persentase yang menurun dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Perkembangan yang menggembirakan terlihat pada tahun 2009, dimana anggaran belanja Dinas Kesehatan mencapai 33,911,840,455.62, dan anggaran ini dapat direalisasikan secara maksimal dengan persentase anggaran belanja sebesar 93.12%. Peningkatan ini dikarenakan oleh Plaform anggaran belanja pada tahun sebelumnya, prioritas pembangunan bidang kesehatan di tahun tersebut, dan meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Berdasarkan analisis selisih anggaran belanja Dinas Kesehatan diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran belanjanya bersifat *underspending* dimana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang disediakan. Namun apakah berarti dengan belanja yang *underspending* ini menunjukkan kinerja yang bagus? Selanjutnya akan kita lihat pada sub bab pembahasan, apakah dengan belanja yang *underspending* pada Dinas Kesehatan dapat mempertahankan kinerja ?.

Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang belanja dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar pada periode 2006-2009 maka dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2009(dalam rupiah dan %)

No	Jenis Belanja	Tahun							
		2006		2007		2008		2009	
1	Belanja tidak langsung	11,203,303,188	44,32	15,875,210,964	60,3	18,456,202,899	65,62	20,910,905,631	66,22
a	Belanja pegawai	11,203,303,188	44,32	15,875,210,964	60,3	18,456,202,899	65,62	20,910,905,631	66,22
2	Belanja langsung	14,074,501,214	55,68	10,450,179,445	39,7	9,670,280,600	34,38	10,668,883,788	33,78
a	Belanja pegawai	656,334,950	0,49	912,545,885	4,23	988,105,939	1,6	1,067,549,900	3,38
b	Belanja barang dan jasa	7,583,305,625	32,11	3,500,040,855	12,53	1,968,944,761	8,91	2,326,908,288	7,37
c	Belanja modal	5,834,860,639	23,08	6,037,592,705	22,93	6,713,229,900	23,87	7,274,425,600	23,04
Rata-rata				4,14		6,84		12,28	

Sumber : Ringkasan Perhitungan APBD, data diolah

Dari tabel diatas maka dapat di informasikan beberapa hal mengenai belanja dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar tahun 2006-2007 :

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar dari tahun 2006-2009 terus mengalami peningkatan yakni 44,32% pada tahun 2006, 60,30% di tahun 2007, 65,62% di tahun 2008, dan 66,22% di tahun 2009. Komponen belanja tidak langsung :

a. Belanja pegawai

Pada tahun 2006-2009 persentase realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan nominal belanja pegawai pada periode tersebut. Pada periode tersebut pegawai-pegawai dinas kesehatan selalu mendapat kenaikan gaji rata-rata 15% setiap tahunnya. Naiknya persentase realisasi belanja pegawai dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar akibat adanya pegawai baru yang diterima. Jumlah pegawai baru yang diterima lebih besar daripada jumlah pegawai yang harus digantikan.

2. Belanja langsung

Pada tahun 2006-2009, belanja langsung dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar terus mengalami penurunan yakni 55,68% di tahun 2006, 39,70% di tahun 2007, 34,38% di tahun 2008, dan 33,78% di tahun 2009. Penurunan ini dihitung dengan membandingkannya terhadap total realisasi belanja dinas kesehatan secara persentase. Komponen belanja langsung tersebut meliputi :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai di tahun 2006-2009 mengalami naik turun baik secara persentase maupun nominalnya. Peningkatan paling drastis terjadi pada tahun

2007 yaitu sebesar 830,10% (dari 0,49 menjadi 4,23%). Peningkatan ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah sangat memperhatikan program pembangunan bidang kesehatan sehingga pada tahun tersebut banyak diadakan acara penyuluhan untuk masyarakat, sehingga total belanja yang dikeluarkan sebagai honor untuk tenaga ahli dan panitia pelaksana kegiatan meningkat. Namun tahun berikutnya belanja pegawai ini mengalami penurunan yang cukup drastis yakni sebesar 263,75% (dari 4,23 menjadi 1,60%). Penurunan ini akibat dari berkurangnya acara penyuluhan kesehatan yang diadakan pemerintah, sebagai dampak dari kurang efektifnya acara penyuluhan tersebut karena hanya dihadiri oleh beberapa masyarakat saja.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa selalu mengalami penurunan. Penurunan paling drastis pada belanja barang dan jasa terjadi di tahun 2007 yaitu sebesar 256,13% (dari 32,11 menjadi 12,53). Penurunan ini dikarenakan dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar sedikit melakukan pengeluaran untuk menjalankan program pelayanan administrasi kantor, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program obat dan perbekalan kesehatan dan program-program lainnya.

c. Belanja modal

Pada tahun 2006-2007 terjadi peningkatan pada belanja modal. Peningkatan belanja ini dikarenakan pada tahun 2007 dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar banyak mengeluarkan biaya untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas dan gedung kantor serta kendaraan dinas/operasional. Namun pada tahun 2007-2009 selalu terjadi penurunan. Hal ini sebagai akibat dari sedikitnya dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, dan pengadaan kendaraan dinas/operasional.

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya belanja tidak langsung mengalami peningkatan dan sebaliknya belanja langsung mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan realisasi anggaran belanja dinas kesehatan terus mengalami kenaikan, dapat dilihat dari pertumbuhan realisasi anggaran tersebut yang pada tahun 2006-2007 sebesar 4,14%, meningkat pada tahun 2007-2008 menjadi 6,84 dan pada tahun 2008-2009 meningkat tajam menjadi 12,28. Hal ini menggambarkan bahwa untuk meningkatkan kinerja dinas kesehatan kabupaten Tanah Datar, pemerintah terus meningkatkan anggarannya dari tahun ke tahun. Untuk melihat peningkatan kinerja pelayanan dinas kesehatan sebagai akibat dari meningkatnya anggaran belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pada Tahun 2006-2009

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan pengukuran kinerja berbasis anggaran, analisis selisih antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya, maka kita akan dapat melihat bagaimana kondisi realisasi Belanja ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2006-2009 (dalam %)

No	Indikator kinerja pelayanan kesehatan	Tahun				Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	
1	Persentase balita Gizi buruk	0,150	0,190	0,190	0,100	0,158
2	Ratio rumah sakit per satuan penduduk	0,030	0,029	0,029	0,029	0,029
3	Ratio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk	0,258	0,259	0,258	0,261	0,259
4	Ratio Posyandu per satuan Balita	17,003	16,991	16,330	20,811	17,784
5	Ratio tenaga kesehatan per satuan penduduk	1,967	1,876	1,475	1,679	1,749
6	Ratio dokter per satuan penduduk	0,264	0,198	0,178	0,246	0,222
7	Angka Kematian Bayi	23,500	22,800	20,400	20,200	21,725
8	Umur Harapan Hidup	69,500	69,800	70,000	70,400	69,925
	Rata-rata seluruh indikator(per tahun)	14,084	14,018	13,607	14,216	
	Pertumbuhan Kinerja		-0,066	-0,410	0,608	

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Tanah Datar dan Tanah Datar Dalam Angka, data diolah

1. Persentase Balita Gizi Buruk

Status balita gizi buruk merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase balita gizi buruk semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada indikator ini yaitu dari rata-rata persentase balita gizi buruk tahun 2006-2009 yaitu sebesar 0,157 %, hanya pada tahun 2006 dan 2009 tingkat balita gizi buruk di kabupaten Tanah Datar adalah diatas rata-rata atau dengan kata lain semakin rendah persentase balita gizi buruk semakin baik kondisi gizi balita, hal ini karena dinas kesehatan selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan sehingga masyarakat terutama ibu-ibu hamil tahu bagaimana menjaga agar asupan gizi bayi tetap baik. Hal ini sejalan dengan besarnya anggaran belanja langsung yang di alokasikan pada tahun 2006 yaitu sebesar 55,68%. Pada tahun 2009, alokasi belanja tidak langsung lebih

besar daripada anggaran belanja langsung yaitu sebesar 60,3%. Jadi, dapat dikatakan pada tahun 2009 lebih menitikberatkan pada peningkatan SDM daripada peningkatan sarana dan prasarana dan hasilnya persentase balita gizi buruk lebih rendah lagi. Dan langkah yang ambil dinas kesehatan ternyata berhasil.

2. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada indikator ini jika dilihat dari rata-rata rasio rumah sakit dari tahun 2006-2009 yaitu sebesar 0,029%, hanya pada tahun 2006 rasio rumah sakit diatas rata-rata bahwa rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, dan tahun 2007-2009 konstan, hal ini diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk sedangkan jumlah rumah sakit yang ada tidak berubah, sehingga pelayanan kesehatannya semakin menurun, selain itu belanja modal yang selalu di alokasikan tiap tahunnya sebesar 68,1% dari belanja lansung hanya di gunakan untuk pemeliharaan gedung bukan untuk pembuatan rumah sakit baru.

3. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Pustu mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan 2009, dikarenakan oleh bertambahnya jumlah puskesmas yang tersedia seiring dengan jumlah penduduk terus meningkat, penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu ini merupakan hasil dari kenaikan anggaran belanja pada tahun tersebut, belanja modal yang sebesar 57,76% pada 2007 dan 68,21% pada 2009 dari belanja lansung dapat di manfaatkan dan dimaksimalkan penggunaannya sehingga dapat membangun puskesmas dan pustu baru.

4. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Dari tahun 2006-2008 kinerja Dinas Kesehatan pada indikator ini terus mengalami penurunan, hal ini akibat dari semakin meningkatnya jumlah balita, tidak dibarengi dengan penambahan jumlah posyandu yang ada atau malah berkurangnya jumlah posyandu, berkurangnya jumlah posyandu sebagai akibat dari alokasi anggaran belanja modal yang tidak seimbang, karena pada tahun 2006-2008 juga terjadi pembangunan puskesmas dan pustu baru, sehingga dana yang ada tersedot kepada pembangunan puskesmas dan pustu tersebut. Anggaran belanja modal yang sebesar 41,45 pada tahun 2006, 57,76 pada tahun 2007, dan 68,21 pada 2008 hampir 50%nya terpakai untuk pembangunan puskesmas dan pustu baru.

5. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya yaitu sebesar 44,32% pada tahun 2006, 60,3% pada tahun 2007, 65,62% pada 2008 dan 66,22 pada 2009 tidak membuat kinerja Dinas Kesehatan pada indikator ini bagus, terbukti dengan menurunnya rasio tenaga kesehatan tiap tahunnya kecuali tahun 2009. Tetapi, jika dilihat dari rata-rata indikator dapat kita simpulkan bahwa hanya pada tahun 2006-2007 rasionya diatas rata-rata. Penurunan rasio pada tahun 2008-2009 lebih disebabkan oleh lebih banyaknya pegawai yang pensiun daripada pegawai yang diterima.

6. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Sama halnya dengan tenaga kesehatan kinerja pelayanan dinas kesehatan pada indikator ini tidak terlalu bagus hanya 2 dari 4 tahun yang di teliti rasionya yang diatas rata-rata. Rendahnya rasio pada tahun 2007 dan 2008 lebih disebabkan

berkurangnya jumlah dokter pada tahun-tahun tersebut sedangkan anggaran untuk belanja pegawai terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 44,32% pada tahun 2006 naik menjadi 66,22% pada tahun 2009. Pengurangan jumlah dokter ini disebabkan oleh karena melanjutkan studinya atau pindah dinas ke daerah lain yang lebih menjanjikan atau juga karena pensiun.

7. Angka Kematian Bayi

Dilihat dari angka kematian bayi dari tahun 2006-2009 terlihat bahwa terjadi penurunan angka kematian bayi, yaitu 23,5 pada 2006, 22,8 pada tahun 2007, 20,4 pada tahun 2008, dan 20,2 pada tahun 2009, ini menggambarkan meningkatnya kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penurunan ini disebabkan semakin berkembangnya teknologi dalam ilmu kedokteran dan dengan anggaran belanja yang begitu besar Dinas Kesehatan dapat meningkatkan teknologi kedokteran di kabupaten Tanah Datar sehingga dapat meminimalisasi kematian bayi.

8. Umur Harapan Hidup

Penurunan angka kematian bayi sangat berpengaruh pada kenaikan umur harapan hidup. Angka kematian bayi sangat peka terhadap perubahan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan Umur Harapan Hidup, meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

5.3 Realisasi Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dari tabel 5.2 dan 5.3 serta penjelasan diatas dapat kita lihat dan simpulkan pada tahun 2006-2007 besarnya kondisi belanja yang besifat *underspending* pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 4,14%, pada tahun 2007-2008 kondisi belanja terus meningkat sampai sebesar 6,84%, dan pada tahun 2008-2009 kondisi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar jauh mengalami peningkatan sampai sebesar 12,28%. Berbanding terbalik dengan kenaikan anggaran, perkembangan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan pelayanan kesehatan malah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2006-2007 sebesar (-0,066), dan 2007-2008 (-0,410), sedangkan pada tahun 2008-2009 kinerja pelayanan mengalami peningkatan menjadi (0,608%).

Ketidakmampuan Dinas Kesehatan dalam menyerap (*underspending*) dan memaksimalkan anggaran yang dialokasikan disebabkan karena perubahan anggaran selalu terlambat setiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, SDM perencana belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mengalokasikan anggaran; dana untuk kegiatan penyusunan anggaran, advokasi dan loby tidak mencukupi; sumber data yang berkualitas dan sarana pendukung kegiatan penyusunan anggaran; tidak ada struktur dan kelembagaan yang dapat mengakomodasikan kegiatan pengalokasian anggaran; serta tidak adanya komitmen politik pemda terhadap peningkatan anggaran kesehatan, serta kurang adanya koordinasi yang baik antara kepala SKPD dengan pimpinan daerah serta DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan APBD perubahan pada pertengahan tahun.

Selain itu tidak terealisasinya anggaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar secara penuh disebabkan karena waktu yang sangat sempit setelah perubahan anggaran dilakukan sehingga menyebabkan banyaknya program yang

telah direncanakan serta dirancang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar tidak terealisasi dengan baik. Kondisi belanja yang *underspending* pada tahun 2006-2007 dan 2007-2008 membuat banyak program yang tidak terealisasi sehingga kinerja tidak dapat ditingkatkan. Menurut Mahsun (2006) karena kinerja lebih rendah pada tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa Dinas Kesehatan tidak dapat mencapai target kinerjanya.

Tetapi pada tahun 2008-2009 kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan, ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Tanah Datar sudah memahami akan arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat dan dukungan dana yang semakin besar maka akan membantu pelaksanaan program serta tujuan yang telah dirancang dan direncanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2008-2009.

Secara umum jika dilihat dari hasil penelitian ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar belum bisa mencapai target kinerjanya sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan fungsi) dari Dinas Kesehatan itu sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap memberikan perhatian yang sangat besar demi kemajuan dibidang kesehatan ini dengan terus meningkatkan pengalokasian anggaran untuk sektor kesehatan, meskipun realisasi kerja Pada tahun 2006-2007, serta 2007-2008 terus mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh steer (2005) yang mana hasil penelitiannya menemukan bahwa layanan publik terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak menjangkau daerah terpencil dan termiskin di Papua, serta juga berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sukarna (2006), yang mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa resiko desentralisasi, khususnya dari sudut pandang pembayaran kesehatan terletak pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor kesehatan. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memprioritaskan program-program yang telah dirancang pada awal tahun dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar kedepannya kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dapat ditingkatkan.

5.4 Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, dan Masyarakat Tanah Datar pada Umumnya. Implikasi Praktis dari hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Dari Hasil Penelitian ini dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Belanja Dinas Kesehatan yang terus meningkat setiap Tahunnya Mulai dari tahun 2006-2009, maka untuk kedepannya diharapkan sekali kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Unsur SKPD dan pihak legislatif yaitu DPRD Kabupaten Tanah Datar Untuk terus dapat meningkatkan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Setiap tahunnya seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, agar pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan tetap memprioritaskan Program-Program Kesehatan yang telah dirancang untuk dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

- b. Dikarenakan dalam hasil penelitian ini realisasi anggaran kinerja terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2008-2009, maka diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang, serta mencari penyebab utama, apa yang menjadi kendala dilapangan sehingga realisasi kinerja kurang memperlihatkan hasil yang mengembirakan.
- c. Karena kinerja yang mengalami penurunan, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar hendaknya pro aktif tentang kondisi tersebut, mungkin hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, dengan diadakannya monitoring terhadap Dinas Kesehatan, Maka hal-hal yang menyebabkan program atau rencana yang akan dijalankan dapat di minimalisir.
- d. Salah satu ukuran yang jelas tentang input suatu program adalah dari belanja program itu sendiri. Dari alokasi belanja yang diberikan untuk Dinas Kesehatan ternyata tidak memberikan Implikasi untuk peningkatan realisasi kinerja malah kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar turun dari tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun 2008-2009.
- e. Untuk lebih meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar terhadap Pelayanan kesehatan, maka diharapkan perlu dilakukan

penyuluhan masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kesehatan,
agar derajat kesehatan Masyarakat dapat Lebih ditingkatkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari kesimpulan ini dapat dilihat realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2006-2009. Pada tahun 2006 anggaran belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 29.211.235.700, dengan realisasi anggaran belanja sebesar 86,63%. Pada tahun 2007 anggaran belanja Dinas Kesehatan mengalami penurunan dengan total anggaran belanja sebesar 28,409,448,059.50, hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya kemampuan Dinas Kesehatan menyerap (*underspending*) menurun, namun anggaran ini dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi anggaran belanja sebesar 92.66%. Pada tahun 2008 anggaran belanja Dinas Kesehatan kembali mengalami kenaikan mencapai angka 32,895,958,087.20, walaupun demikian realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan tidak dapat dimaksimalkan dan hanya terealisasi sebesar 85.50% hal ini menunjukkan persentase yang menurun dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Perkembangan yang menggembirakan terlihat pada tahun 2009, dimana anggaran belanja Dinas Kesehatan mencapai 33,911,840,455.62, dan anggaran ini dapat direalisasikan secara maksimal dengan persentase

anggaran belanja sebesar 93.12%. Rata-rata alokasi untuk belanja pegawai adalah 59,11% dari keseluruhan belanja sektor kesehatan, alokasi untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar 14,24% dari rata-rata belanja keseluruhan, sedangkan untuk belanja modal alokasinya adalah sebesar 23,23% dari rata-rata belanja keseluruhan.

Sedangkan menurunnya anggaran belanja Dinas Kesehatan yang terjadi pada Tahun 2006-2007 disebabkan karena beberapa factor antara lain :

- a. Terlambatnya Pengesahan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pengesahan perubahan APBD baru dilaksanakan pada bulan November, keterlambatan pengesahan APBD mengakibatkan tidak terserapnya seluruh anggaran. Hal ini juga mengakibatkan banyak program yang direncanakan tidak teralisasi, karena waktu pelaksanaan yang tersisa sangat sempit. Sehingga mengakibatkan Dinas Kesehatan tidak mampu mencapai target kinerjanya, sehingga setiap tahun kinerjanya cenderung mengalami penurunan
 - b. Menurunnya anggaran untuk Dinas kesehatan disebabkan karena, ada hal lain yang sangat mendesak untuk dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sehingga Alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Kesehatan ini harus dipangkas dan dialokasikan kepada SKPD lain yang lebih membutuhkan.(pemilu, gempa bumi dan lain-lain)
2. Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan pada tahun 2006-2009, yang mana indikatornya sebagai berikut :

a. Persentase balita gizi buruk

Jika dilihat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada indikator ini yaitu dari rata-rata pesentase balita gizi buruk tahun 2006-2009 yaitu sebesar 0,157 %, hanya pada tahun 2006 dan 2009 tingkat balita gizi buruk di kabupaten Tanah Datar baik, hal ini karena dinas kesehatan selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan.

b. Ratio rumah sakit persatuan penduduk

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada indikator ini jika dilihat dari rata-rata rasio rumah sakit dari tahun 2006-2009 yaitu sebesar 0,029%, hanya pada tahun 2006 rasio rumah sakit diatas rata-ratabahwa rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, dan tahun 2008-2009 konstan.

c. Ratio Rumah sakit dan pustu persatuan penduduk

Rasio Puskesmas dan Pustu mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan 2009, dikarenakan oleh bertambahnya jumlah puskesmas yang tersedia seiring dengan jumlah penduduk terus meningkat.

d. Ratio posyandu persatuan Balita

Dari tahun 2006-2008 kinerja Dinas Kesehatan pada indikator ini terus mengalami penurunan, hal ini akibat dari semakin banyaknya balita dan berkurangnya jumlah posyandu yang ada, berkurangnya jumlah posyandu sebagai akibat dari alokasi anggaran belanja modal yang tidak seimbang, karena pada tahun 2006-2008 juga terjadi

pembangunan puskesmas dan pustu baru, sehingga dana yang ada tersedot kepada pembangunan puskesmas dan pustu tersebut

e. Ratio tenaga kesehatan persatuan penduduk

Semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya yaitu sebesar 44,32% pada tahun 2006, 60,3% pada tahun 2007, 65,62% pada 2008 dan 66,22 pada 2009 tidak membuat kinerja Dinas Kesehatan pada indikator ini bagus, terbukti dengan menurunnya rasio tenaga kesehatan tiap tahunnya kecuali tahun 2009.

f. Ratio dokter persatuan penduduk

Sama halnya dengan tenaga kesehatan kinerja pelayanan dinas kesehatan pada indikator ini tidak terlalu bagus hanya 2 dari 4 tahun yang di teliti rasionya yang diatas rata-rata. Rendahnya rasio pada tahun 2007 dan 2008 lebih disebabkan berkurangnya jumlah dokter pada tahun-tahun tersebut sedangkan anggaran untuk belanja pegawai terus meningkat setiap tahunnya

g. Angka Kematian Bayi

Dilihat dari angka kematian bayi dari tahun 2006-2009 terlihat bahwa terjadi penurunan angka kematian bayi, ini menggambarkan meningkatnya kualitas hidup

h. Umur Harapan Hidup

Jika dilihat dari hasil penelitian ini bahwa angka harapan hidup masyarakat Tanah Datar dari tahun 2006-2009 terus mengalami

kenaikan, ini berarti derajat kesehatan masyarakat Tanah Datar telah mengalami peningkatan.

6.2. Saran Penelitian

Berdasarkan analisa, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Persentase balita gizi buruk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu mulai dengan meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakatnya.

b. Ratio rumah sakit persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah jumlah ruangan di rumah sakit, jumlah tenaga kesehatan dan kualitasnya serta lebih mengintensifkan imbauan penggunaan KB.

c. Ratio Puskesmas dan Pustu persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah jumlah Puskesmas dan Pustu dan lebih meningkatkan supply dan ketersediaan obat-obatan.

d. Ratio Posyandu persatuan Balita

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah

jumlah Posyandu dan giat melakukan penyuluhan kesehatan serta imunisasi.

e. Ratio tenaga kesehatan persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatannya agar pelayanan dan kualitas kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku.

f. Ratio dokter persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan untuk menambah jumlah Dokter yang ada.

g. Angka Kematian Bayi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatannya agar pelayanan dan kualitas kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku dan semakin sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

h. Umur Harapan Hidup

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk tetap terus meningkatkan anggaran belanja Dinas Kesehatan disamping itu meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya dan memberitahukan tentang bagaimana pola hidup sehat.

- i. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar hendaknya terus berupaya dalam meningkatkan Kinerjanya, untuk anggaran yang bersifat program dan kegiatan hendaknya direncanakan lebih matang, sehingga tidak perlu menunggu perubahan anggaran untuk melaksanakannya.
- j. Untuk dapat meningkatkan kinerja, maka diharapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memicu kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Tanpa kesadaran serta partisipasi masyarakat tentang kesehatan maka keberhasilan program akan sulit dicapai.
- k. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Bersama Dengan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar Hendaknya secara cepat melaksanakan perubahan anggaran dalam APBD kabupaten Tanah Datar, agar program-program yang telah dirancang dan dirancakan dapat direalisasikan dengan cepat, karena menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal 86 ayat (2) “Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ditetapkan dengan peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- l. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan Evaluasi serta penilaian terhadap kinerja pelayanan yang dilakuakn oleh Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar guna menjamin terlaksanya pelaksanaan program pembangunan sektor kesehatan yang ekonomis, efektif dan efisien.

- m. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan hendaknya mengoptimalkan Pemanfaatan puskesmas dengan saran dan prasarana yang lebih lengkap tanpa ada batasan waktu untuk mengaksesnya.
- n. Meningkatkan Kerja sama Lintas sektor antar pemerintah, masyarakat dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan serta perlu meningkatkan akses pada sarana dan pelayanan kesehatan sehingga dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2008. *Pengalokasian Belanja Fisik Dalam Anggaran Pemerintah Daerah : Studi Empiris Atas Determinan Dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan*. <http://swamandiri.org>
- Akbar, Rusdi. 2007. "Indikator Kinerja dengan Model Matriks Kinerja", dipresentasikan dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah, World Bank Institute, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (PPE-FEUGM), dan Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD), Yogyakarta, 26-27 Januari.
- BPS. 2006-2008 .**Tanah Datar Dalam Angka**. BPS Tanah Datar
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Isdijoso, Brahmantio, Tri Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*
- Kabupaten Tanah Datar. 2004. <http://www.kompas.co.id/kompascetak/0410/21/naper/1325394.htm>
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang **Kebijakan Pembangunan Kesehatan**
- Kumorotoro, Wahyudi. 2008. Teknik Penganggaran Untuk Perencanaan Sosial.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 **Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- Prasojo Eko, Teguh Kurniawan, Azwar Hasan. 2005. *Efisiensi Anggaran Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Di Kabupaten Jembrana*.

- Dinas Kesehatan, 2006-2009. Profil Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiscal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Steer Andrew. 2005. *Analisis Pengeluaran Public Papua Sebuah Tinjauan Umum*, World Bank Publication.
- Sukarna Laode Ahmad, Nanis Budiningsih, Sigit Riyarto. 2006. *Analisis Kesiapan Dinas Kesehatan Dalam Mengalokasikan Anggaran Kesehatan Pada Era Desentralisasi*
- Tayomah Nina, Syaikhu Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan Di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar*
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 *Tentang Kesehatan*
- Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta : Larela Pustaka Utama
- Widodo, Joko. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Palanta

KABUPATEN TANAH DATAR
R.D. 2006/ DINKESOS

PERINTAHAN : 05 BIDANG KESEHATAN DAN SOSIAL
SASAS : 01 DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

KODING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Telah Direalisasi		Penjelasan
			Jumlah	Bertambah/ Berkurang	
2	3	4	5	6	
	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL	29,211,235,700	25,277,804,402	(3,933,431,298)	
	PELAYANAN PUBLIK	29,211,235,700	25,277,804,402	(3,933,431,298)	
	Belanja Administrasi Umum	21,964,584,700	18,183,433,047	(3,781,151,653)	
1.	Belanja Pegawai / Personalia	12,042,329,000	11,203,303,188	(839,025,812)	
1. 03.	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,674,379,000	9,023,098,063	(651,280,937)	Jumlah Beban tetap Rp. 9,023,098,063 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 9,023,098,063 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp.
1. 05.	Biaya pengembangan sumber daya manusia	30,000,000	28,855,000	(1,145,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 30,000,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 28,855,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 28,855,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 1,145,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 06.	Biaya kesejahteraan pegawai.	479,400,000	396,108,750	(83,291,250)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 415,400,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 396,108,750 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 396,108,750 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 19,291,250 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 08.	Honorarium/ upah	656,500,000	630,450,000	(26,050,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 656,500,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 630,450,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 630,450,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 26,050,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
APBD 2006/ DINKESOS

	2	3	4	5	6
1. 09	Uang lembur	4.000.000	3.990.000	(10.000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 4.000.000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 3.990.000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 3.990.000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 10.000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 1. 10	Tunjangan Daerah	1.198.050.000	1.120.801.375	(77.248.625)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 1.198.050.000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 1.120.801.375 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 1.120.801.375 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 77.248.625 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 2	<u>Belanja Barang dan Jasa</u> BT	<u>9.794.755.700</u>	<u>6.852.957.759</u>	<u>(2.941.797.941)</u>	
1. 2 01.	Biaya bahan pakai habis kantor.	7.964.255.700	5.310.250.671	(2.654.005.029)	Jumlah Beban tetap Rp. 668.552.000 Jumlah Pengisian Kas Rp. 4.641.808.700 Jumlah yang diSPJkan Rp. 5.310.250.671 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 5.310.250.671 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 108.000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. 29
1. 2 02.	Biaya jasa kantor.	76.300.000	65.259.638	(11.040.362)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 77.857.000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 65.259.638 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 65.259.638 Jumlah Contra Pos Rp. 1.557.000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 11.040.362 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 2 03.	Biaya cetak & penggandaan keperluan kantor	18.250.000	18.231.450	(18.550)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 18.250.000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 18.231.450 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 18.231.450 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 18.550 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
RABD 2006/ DINKESOS

	2	3	4	5	6
1. 2 05.	Biaya makanan dan minuman kantor	4,250,000	4,250,000	-	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 4,250,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 4,250,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 4,250,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 2 06.	Biaya pakaian dinas	131,700,000	-	(131,700,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. - Jumlah yang diSPJkan Rp. - Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. - Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 2 18.	Biaya jaminan pelayanan Kes Masy tk puskesm	1,600,000,000	1,454,966,000	(145,034,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 1,600,000,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 1,454,966,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 1,454,966,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 145,034,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 3	<u>BL</u> <u>Belanja Perjalanan Dinas.</u> BL	95,000,000	94,675,700	(324,300)	
1. 3 01.	Biaya perjalanan dinas.	95,000,000	94,675,700	(324,300)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 95,000,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 94,675,700 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 94,675,700 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 324,300 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 4	<u>BL</u> <u>Belanja Pemeliharaan.</u> BL	32,500,000	32,496,400	(3,600)	
1. 4 05.	Biaya pemeliharaan bangunan gedung	5,000,000	5,000,000	-	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 5,000,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 5,000,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 5,000,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
 DD 2006/ DINKESOS

	2	3	4	5	6
08.	Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan	20,000,000	19,997,400	(2,600)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 20,000,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 19,997,400 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 19,997,400 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 2,600 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
11.	Biaya pemeliharaan alat-alat kantor & RT	7,500,000	7,499,000	(1,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 7,500,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 7,499,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 7,499,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 1,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	1,320,651,000	1,259,510,716	(61,140,284)	
1.	BL Belanja Pegawai / Personalia	130,115,000	123,791,250	(6,323,750)	
1. 01.	Honorarium/ Upah	122,810,000	116,741,250	(6,068,750)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 122,810,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 116,741,250 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 116,741,250 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 6,068,750 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
1. 02.	Uang lembur	7,305,000	7,050,000	(255,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 7,305,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 7,050,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 7,050,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 255,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
2.	BL BBJ Belanja Barang dan Jasa.	770,192,475.00	730,347,866.00	(39,844,609.00)	
2. 2. 01.	Biaya bahan/material	255,572,075.00	251,232,240	(4,339,835)	Jumlah Beban tetap Rp. 213,359,190 Jumlah Pengisian Kas Rp. 52,334,075 Jumlah yang diSPJkan Rp. 251,232,240 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 251,232,240 Jumlah Contra Pos Rp. 11,701,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 2,760,025 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
 APBD 2006/ DINKESOS

1	2	3	4	5	6
2. 2. 02.	Biaya jasa pihak ketiga.	386,041,000	368,388,176	(17,652,824)	Jumlah Beban tetap Rp. 148,974,000 Jumlah Pengisian Kas Rp. 236,966,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 368,388,176 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 368,388,176 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 17,551,824 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
2. 2. 03.	Biaya cetak dan penggandaan	37,091,400	37,091,400	-	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 37,091,400 Jumlah yang diSPJkan Rp. 37,091,400 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 37,091,400 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
2. 2. 04.	Biaya sewa	7,860,000	5,245,000	(2,615,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 7,860,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 5,245,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 5,245,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 2,615,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
2. 2. 05.	Biaya makanan dan minuman	83,628,000	68,391,050	(15,236,950)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 83,628,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 68,391,050 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 68,391,050 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 15,236,950 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
2. 3. 01	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u> 01	220,652,500	209,592,500	(11,060,000)	
2. 3. 01.	Biaya perjalanan dinas	220,652,500	209,592,500	(11,060,000)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 220,652,500 Jumlah yang diSPJkan Rp. 209,592,500 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 209,592,500 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 11,060,000 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
 RD 2006/ DINKESOS

2		3	4	5	6	
4.	<i>BUM</i> <u>Belanja Pemeliharaan.</u>	199,691,025	195,779,100	(3,911,925)		
4. 05.	Biaya pemeliharaan bangunan gedung	108,800,000	108,450,000	(350,000)	Jumlah Beban tetap	Rp. 108,450,000
					Jumlah Pengisian Kas	Rp.
					Jumlah yang diSPJkan	Rp. 108,450,000
					Jumlah Perhitungan Anggaran	Rp. 108,450,000
					Sisa UUDP yang disetorkan	Rp. -
					Sisa UUDP pada Pemegang Kas	Rp. -
4. 08	Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan	85,089,775	81,536,100	(3,553,675)	Jumlah Beban tetap	Rp. -
					Jumlah Pengisian Kas	Rp. 85,089,775
					Jumlah yang diSPJkan	Rp. 81,536,100
					Jumlah Perhitungan Anggaran	Rp. 81,536,100
					Sisa UUDP yang disetorkan	Rp. 3,553,675
					Sisa UUDP pada Pemegang Kas	Rp. -
4. 11.	Biaya pemeliharaan alat-alat kantor & RT	5,801,250	5,793,000	(8,250)	Jumlah Beban tetap	Rp. -
					Jumlah Pengisian Kas	Rp. 5,801,250
					Jumlah yang diSPJkan	Rp. 5,793,000
					Jumlah Perhitungan Anggaran	Rp. 5,793,000
					Sisa UUDP yang disetorkan	Rp. 8,250
					Sisa UUDP pada Pemegang Kas	Rp. -
3.	<i>BUM</i> <u>Belanja Modal</u>	5,926,000,000	5,834,860,639	(91,139,361)		
3. 6.	<u>Belanja modal bangunan tempat bekerja</u>	1,975,000,000	1,963,347,000	(11,653,000)		
3. 6. 01.	Belanja modal bangunan tempat bekerja	1,975,000,000	1,963,347,000	(11,653,000)	Jumlah Beban tetap	Rp. 1,963,347,000
					Jumlah Pengisian Kas	Rp.
					Jumlah yang diSPJkan	Rp. 1,963,347,000
					Jumlah Perhitungan Anggaran	Rp. 1,963,347,000
					Sisa UUDP yang disetorkan	Rp. -
					Sisa UUDP pada Pemegang Kas	Rp. -
3. 9.	<u>Belanja modal alat-alat angkutan</u>	1,367,500,000	1,363,719,000	(3,781,000)		
3. 9. 01.	Belanja modal alat-alat angk.darat bermotor	1,367,500,000	1,363,719,000	(3,781,000)	Jumlah Beban tetap	Rp. 1,363,719,000
					Jumlah Pengisian Kas	Rp.
					Jumlah yang diSPJkan	Rp. 1,363,719,000
					Jumlah Perhitungan Anggaran	Rp. 1,363,719,000
					Sisa UUDP yang disetorkan	Rp. -
					Sisa UUDP pada Pemegang Kas	Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
 APBD 2006/ DINKESOS

	2	3	4	5	6
4. BUB Belanja Pemeliharaan.		199,691,025	195,779,100	(3,911,925)	
4. 05. Biaya pemeliharaan bangunan gedung		108,800,000	108,450,000	(350,000)	Jumlah Beban tetap Rp. 108,450,000 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. 108,450,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 108,450,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
4. 08. Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan		85,089,775	81,536,100	(3,553,675)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 85,089,775 Jumlah yang diSPJkan Rp. 81,536,100 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 81,536,100 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 3,553,675 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
4. 11. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor & RT		5,801,250	5,793,000	(8,250)	Jumlah Beban tetap Rp. - Jumlah Pengisian Kas Rp. 5,801,250 Jumlah yang diSPJkan Rp. 5,793,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 5,793,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. 8,250 Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
3. BUBB Belanja Modal		5,926,000,000	5,834,860,639	(91,139,361)	
3. 6. Belanja modal bangunan tempat bekerja		1,975,000,000	1,963,347,000	(11,653,000)	
3. 6. 01. Belanja modal bangunan tempat bekerja		1,975,000,000	1,963,347,000	(11,653,000)	Jumlah Beban tetap Rp. 1,963,347,000 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. 1,963,347,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 1,963,347,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
3. 9. Belanja modal alat-alat angkutan		1,367,500,000	1,363,719,000	(3,781,000)	
3. 9. 01. Belanja modal alat-alat angk.darat bermotor		1,367,500,000	1,363,719,000	(3,781,000)	Jumlah Beban tetap Rp. 1,363,719,000 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. 1,363,719,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 1,363,719,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

KABUPATEN TANAH DATAR
APBD 2006/ DINKESOS

	2	3	4	5	6
3. 12	Belanja modal alat-alat kantor dan RT	72,800,000	72,012,500	(787,500)	
3. 12 01.	Belanja modal alat kantor	48,400,000	47,812,500	(587,500)	Jumlah Beban tetap Rp. 47,812,500 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. 47,812,500 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 47,812,500 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
3. 12 03	Belanja modal komputer	18,000,000	17,800,000	(200,000)	Jumlah Beban tetap Rp. 17,800,000 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. 17,800,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 17,800,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
3. 12 04	Belanja modal meja dan kursi	6,400,000	6,400,000	-	Jumlah Beban tetap Rp. Jumlah Pengisian Kas Rp. 6,400,000 Jumlah yang diSPJkan Rp. 6,400,000 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 6,400,000 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -
3. 14.	Belanja modal alat kedokteran/ kesehatan	2,510,700,000	2,435,782,139	(74,917,861)	
3. 14. 02.	Belanja modal alat-alat kesehatan	2,510,700,000	2,435,782,139	(74,917,861)	Jumlah Beban tetap Rp. 2,435,782,139 Jumlah Pengisian Kas Rp. Jumlah yang diSPJkan Rp. 2,435,782,139 Jumlah Perhitungan Anggaran Rp. 2,435,782,139 Sisa UUDP yang disetorkan Rp. - Sisa UUDP pada Pemegang Kas Rp. -

No	Uraian Unit Kerja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp.)	Berlebih (Berkurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
32	DINAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	165.720.946.000,00	147.075.624.496,50	(18.645.321.503,50)
	PELAYANAN PUBLIK	165.720.946.000,00	147.075.624.496,50	(18.645.321.503,50)
A.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	144.638.016.000,00	129.479.315.021,50	(15.158.700.978,50)
	1 Belanja Pegawai	140.688.146.000,00	126.867.929.367,50	(13.820.216.632,50)
	2 Belanja Barang & Jasa	3.182.770.000,00	1.860.917.479,00	(1.321.852.521,00)
	3 Belanja Perjalanan Dinas	309.600.000,00	303.865.000,00	(5.735.000,00)
	4 Belanja Pemeliharaan	457.500.000,00	446.603.175,00	(10.896.825,00)
B.	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	15.130.771.000,00	14.441.205.550,00	(689.565.450,00)
	1 Belanja Pegawai	1.312.510.000,00	1.219.508.500,00	(93.001.500,00)
	2 Belanja Barang & Jasa	4.619.544.500,00	4.310.039.550,00	(309.504.950,00)
	3 Belanja Perjalanan Dinas	441.099.000,00	394.300.000,00	(46.799.000,00)
	4 Belanja Pemeliharaan	8.757.617.500,00	8.517.357.500,00	(240.260.000,00)
C.	<u>Belanja Modal</u>	5.952.159.000,00	3.155.103.925,00	(2.797.055.075,00)
	1 Belanja Modal Jaringan	26.880.000,00	17.680.000,00	(9.200.000,00)
	2 Belanja Modal Bangunan Gedung	3.933.576.500,00	1.307.085.000,00	(2.626.491.500,00)
	3 Belanja Modal Alat-alat Angkutan	337.000.000,00	302.240.000,00	(34.760.000,00)
	4 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan RT	1.120.626.500,00	998.661.000,00	(121.965.500,00)
	5 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi	55.000.000,00	54.100.000,00	(900.000,00)
	6 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	211.163.000,00	209.596.000,00	(1.567.000,00)
	7 Belanja Modal Buku/Perpustakaan	219.913.000,00	218.341.925,00	(1.571.075,00)
	8 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	48.000.000,00	47.400.000,00	(600.000,00)
33.	<u>DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL</u>	29.211.235.700,00	25.363.298.241,00	(3.847.937.459,00)
	PELAYANAN PUBLIK	29.211.235.700,00	25.363.298.241,00	(3.847.937.459,00)
A.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	21.964.584.700,00	18.268.926.886,00	(3.695.657.814,00)
	1 Belanja Pegawai TDL	12.042.329.000,00	11.203.303.188,00	(839.025.812,00)
	2 Belanja Barang & Jasa	9.794.755.700,00	6.938.451.598,00	(2.856.304.102,00)
	3 Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	94.675.700,00	(324.300,00)
	4 Belanja Pemeliharaan	32.500.000,00	32.496.400,00	(3.600,00)

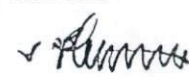
No	Uraian Unit Kerja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp.)	Berlebih (Berkurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
B.	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	1.320.651.000,00	1.259.510.716,00	(61.140.284,00)
	1 Belanja Pegawai ✓	130.115.000,00	123.791.250,00	(6.323.750,00)
	2 Belanja Barang & Jasa ✓	770.192.475,00	730.347.866,00	(39.844.609,00)
	3 Belanja Perjalanan Dinas ✓	220.652.500,00	209.592.500,00	(11.060.000,00)
	4 Belanja Pemeliharaan ✓	199.691.025,00	195.779.100,00	(3.911.925,00)
C.	<u>Belanja Modal</u>	5.926.000.000,00	5.834.860.639,00	(91.139.361,00)
	1 Belanja Modal Bangunan Gedung	1.975.000.000,00	1.963.347.000,00	(11.653.000,00)
	2 Belanja Modal Alat-alat Angkutan	1.367.500.000,00	1.363.719.000,00	(3.781.000,00)
	3 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan RT	72.800.000,00	72.012.500,00	(787.500,00)
	4 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran / Kesehatan	2.510.700.000,00	2.435.782.139,00	(74.917.861,00)
34.	<u>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA</u>	4.794.470.375,00	4.100.701.487,00	(693.768.888,00)
	<u>PELAYANAN PUBLIK</u>	4.794.470.375,00	4.100.701.487,00	(693.768.888,00)
A.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	2.987.180.000,00	2.744.609.587,00	(242.570.413,00)
	1 Belanja Pegawai	2.860.955.000,00	2.657.742.854,00	(203.212.146,00)
	2 Belanja Barang & Jasa	58.225.000,00	26.284.033,00	(31.940.967,00)
	3 Belanja Perjalanan Dinas	32.750.000,00	28.188.200,00	(4.561.800,00)
	4 Belanja Pemeliharaan	35.250.000,00	32.394.500,00	(2.855.500,00)
B.	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	1.693.020.375,00	1.242.737.650,00	(450.282.725,00)
	1 Belanja Pegawai	400.800.000,00	371.635.000,00	(29.165.000,00)
	2 Belanja Barang & Jasa	580.638.950,00	390.611.150,00	(190.027.800,00)
	3 Belanja Perjalanan Dinas	388.529.500,00	312.205.000,00	(76.324.500,00)
	4 Belanja Pemeliharaan	323.051.925,00	168.286.500,00	(154.765.425,00)
C.	<u>Belanja Modal</u>	114.270.000,00	113.354.250,00	(915.750,00)
	1 Belanja Modal Instalasi	70.000.000,00	69.350.000,00	(650.000,00)
	2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.640.000,00	26.449.250,00	(190.750,00)
	3 Belanja Modal Alat-alat studio dan Alat-alat Komunikasi	3.630.000,00	3.630.000,00	-
	4 Belanja Modal Alat-alat Bermesin	14.000.000,00	13.925.000,00	(75.000,00)

Jakun

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2007 Nomor : 43 /DPPA-SKPD/DALBANG-2007					Formulir DPPA SKPD	
Urusan Pemerintahan : 1.02. KESIHATAN						
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan						
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah	Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4		5	6
4	PENDAPATAN					
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,700,000,000		3,137,647,500	1,437,647,500	84.57
	TOTAL PENDAPATAN	1,700,000,000		3,137,647,500	1,437,647,500	84.57
3	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,005,106,000		14,193,362,882.50	1,188,256,883	9.14
3 1	BELANJA PEGAWAI	13,005,106,000		14,193,362,882.50	1,188,256,883	9.14
5 2	BELANJA LANGSUNG	14,311,862,000		14,216,085,177.00	(95,776,823.00)	-0.67
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1,561,400,250		1,596,448,427	35,048,177	2.24
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,116,711,750		3,506,851,750	1,390,140,000	65.67
5 2 3	BELANJA MODAL	10,633,750,000		9,112,785,000	(1,520,965,000)	-14.30
	TOTAL BELANJA	27,316,968,000		28,409,448,059.50	1,092,480,059.50	4.00
	Surplus/Defisit	(25,616,968,000)		(25,271,800,560)	(345,167,441)	1.35
	Pembiayaan Netto					
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah per Triwulan						
	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	PENDAPATAN	784,411,875	784,411,875	784,411,875	784,411,875	3,137,647,500
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,548,340,721	3,548,340,721	3,548,340,721	3,548,340,721	14,193,362,882.5
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3,554,021,294	3,554,021,294	3,554,021,294	3,554,021,294	14,216,085,177
	Jumlah					31,547,095,560

Batusangkar, 16-11-2007

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Datar



Ir. SYAMSUL BAHRI
NIP. 010153811

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2007

RUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan dan Sosial

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah (berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
02.1.02.01.00.00.5	BELANJA DAERAH				
02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,005,106,000.00	14,193,362,882.50	1,188,256,882.50	9.14
02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	13,005,106,000.00	14,193,362,882.50	1,188,256,882.50	
02.1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	13,692,533,000.00	13,340,324,677.00	(352,208,323.00)	(2.57)
02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,030,547,000.00	1,149,932,000.00	119,385,000.00	11.58
02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71,379,000.00	71,379,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,379,000.00	71,379,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36,580,500.00	27,685,500.00	(8,895,000.00)	(24.32)
02.1.02.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,380,500.00	5,380,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.03.5.2.3	Belanja Modal	31,200,000.00	22,305,000.00	(8,895,000.00)	(28.51)
02.1.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		9,400,000.00		
02.1.02.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai		9,400,000.00		
02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	22,522,500.00	22,522,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,522,500.00	22,522,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,067,500.00	18,067,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,067,500.00	18,067,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5,480,000.00		
02.1.02.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal		5,480,000.00		
02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12,127,500.00	12,127,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,127,500.00	12,127,500.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	67,500,000.00	77,500,000.00	10,000,000.00	14.81
02.1.02.01.01.18.5.2.1	Belanja Pegawai	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,500,000.00	73,500,000.00	10,000,000.00	15.75
02.1.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	800,750,000.00	904,150,000.00	103,400,000.00	12.91
02.1.02.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	800,750,000.00	904,150,000.00	103,400,000.00	12.91
02.1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	635,155,000.00	462,365,000.00	(172,790,000.00)	(27.20)
02.1.02.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	582,450,000.00	409,660,000.00	(172,790,000.00)	(29.67)
02.1.02.01.02.21.5.2.1	Belanja Pegawai	174,735,000.00		(174,735,000.00)	(100.00)
02.1.02.01.02.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	407,715,000.00		(407,715,000.00)	(100.00)
02.1.02.01.02.21.5.2.3	Belanja Modal		409,660,000.00		
02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,405,000.00	9,405,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,405,000.00	9,405,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.05.01.5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,770,000.00	5,770,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	5,275,000.00	5,275,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,725,000.00	9,725,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	144,520,000.00	144,520,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,830,000.00	71,830,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.1.02.01.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

1			2			3	4	5 = 4-3	6	
1.02	1.02.01	15 05				Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	15 05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
1.02	1.02.01	16 01				Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringan	2,701,066,000.00	2,124,577,677.00	(576,488,323.00)	(21.34)
1.02	1.02.01	16 01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa		1,437,647,500.00		
1.02	1.02.01	16 02				Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 02	5	2	1	Belanja Pegawai	3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 03				Pengadaan; peningkatan; dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	323,382,000.00	323,382,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 03	5	2	1	Belanja Pegawai	18,925,000.00	18,925,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	304,457,000.00	304,457,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 09				Peningkatan kesehatan masyarakat	2,100,000,000.00	85,864,177.00	(2,014,135,823.00)	(95.91)
1.02	1.02.01	16 09	5	2	1	Belanja Pegawai		85,864,177.00		
1.02	1.02.01	16 09	5	2	3	Belanja Modal	2,100,000,000.00	0.00	(2,100,000,000.00)	(100.00)
1.02	1.02.01	16 11				Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 11	5	2	1	Belanja Pegawai	23,320,000.00	23,320,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 13				Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 14				Monitoring; evaluasi dan pelaporan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 14	5	2	1	Belanja Pegawai	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 14	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 16				Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di Masyarakat	207,684,000.00	207,684,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 16	5	2	1	Belanja Pegawai	24,960,000.00	24,960,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	38,724,000.00	38,724,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	16 16	5	2	3	Belanja Modal	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17				Program Pengawasan Obat dan Makanan				
1.02	1.02.01	17 01				Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	82,595,000.00	82,595,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 01	5	2	1	Belanja Pegawai	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 02				Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	32,450,000.00	32,450,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 02	5	2	1	Belanja Pegawai	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 04				Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	17 04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,595,000.00	5,595,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1.02	1.02.01	19 01				Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 02				Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 02	5	2	1	Belanja Pegawai	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 04				Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 04	5	2	1	Belanja Pegawai	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 05				Monitoring; evaluasi dan pelaporan	16,980,000.00	16,980,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	19 05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	20				Program Perbaikan gizi Masyarakat				
1.02	1.02.01	20 02				Pemberian makanan tambahan dan Penyuluhan	54,560,000.00	54,560,000.00	54,560,000.00	
1.02	1.02.01	20 02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa		54,560,000.00		54,560,000.00
1.02	1.02.01	21				Program pengembangan lingkungan sehat				
1.02	1.02.01	21 01				Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 02				Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 03				Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 04				Monitoring; evaluasi dan pelaporan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	21 04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				
1.02	1.02.01	22 04				Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	292,174,750.00	292,174,750.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	99,720,000.00	99,720,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 05				Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	99,720,000.00	99,720,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 05	5	2	1	Belanja Pegawai	142,174,750.00	142,174,750.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	59,615,000.00	59,615,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 08				Peningkatan imunisasi	82,559,750.00	82,559,750.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 09				Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 09	5	2	1	Belanja Pegawai	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 10				Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	14,940,000.00	14,940,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 10	5	2	1	Belanja Pegawai	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	0.00
1.02	1.02.01	22 10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18,220,000.00	18,220,000.00	0.00	0.00

1			2			3	4	5=4-3	6	
1.02	1.02.01	23				Program standarisasi pelayanan kesehatan	42,000,000.00	61,595,000.00	19,595,000.00	46.1
1.02	1.02.01	23	02			Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	5,000,000.00	24,595,000.00	19,595,000.00	391.1
1.02	1.02.01	23	02	5	2	1 Belanja Pegawai	2,725,000.00	17,820,000.00	15,095,000.00	553.1
1.02	1.02.01	23	02	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	2,275,000.00	6,775,000.00	4,500,000.00	197.1
1.02	1.02.01	23	03			Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	23	03	5	2	1 Belanja Pegawai	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	23	03	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	23	06			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	23	06	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	25				Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	8,358,550,000.00	8,531,340,000.00	172,790,000.00	2.0
1.02	1.02.01	25	01			Pembangunan puskesmas		2,524,131,000.00		
1.02	1.02.01	25	01	5	2	3 Belanja Modal		2,524,131,000.00		
1.02	1.02.01	25	02			Pembangunan puskesmas pembantu	1,204,500,000.00	1,919,000,000.00	714,500,000.00	59.3
1.02	1.02.01	25	02	5	2	3 Belanja Modal	1,204,500,000.00	1,919,000,000.00	714,500,000.00	59.3
1.02	1.02.01	25	07			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	2,194,700,000.00	2,117,700,000.00	(77,000,000.00)	(3.5)
1.02	1.02.01	25	07	5	2	3 Belanja Modal	2,194,700,000.00	2,117,700,000.00	(77,000,000.00)	(3.5)
1.02	1.02.01	25	11			Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	4,409,350,000.00	180,000,000.00	(4,229,350,000.00)	(95.9)
1.02	1.02.01	25	11	5	2	3 Belanja Modal	4,409,350,000.00	180,000,000.00	(4,229,350,000.00)	(95.9)
1.02	1.02.01	25	12			Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	550,000,000.00	515,415,000.00	(34,585,000.00)	(6.2)
1.02	1.02.01	25	12	5	2	3 Belanja Modal	550,000,000.00	515,415,000.00	(34,585,000.00)	(6.2)
1.02	1.02.01	25	14			Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas		550,094,000.00		
1.02	1.02.01	25	14	5	2	3 Belanja Modal		550,094,000.00		
1.02	1.02.01	25	15			Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas		725,000,000.00		
1.02	1.02.01	25	15	5	2	3 Belanja Modal		725,000,000.00		
1.02	1.02.01	28				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	137,825,250.00	168,565,250.00	30,740,000.00	
1.02	1.02.01	28	05			Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	137,825,250.00	137,825,250.00		
1.02	1.02.01	28	05	5	2	1 Belanja Pegawai	137,825,250.00	137,825,250.00		
1.02	1.02.01	28	08			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		30,740,000.00		
1.02	1.02.01	28	08	5	2	1 Belanja Pegawai		30,740,000.00		
1.02	1.02.01	28	08	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa		2,625,000.00		
1.02	1.02.01	28	08	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa		28,115,000.00		
1.02	1.02.01	29				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	22,350,000.00	22,350,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	29	01			Penyuluhan kesehatan anak balita	14,350,000.00	14,350,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	29	01	5	2	1 Belanja Pegawai	4,505,000.00	4,505,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	29	01	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	9,845,000.00	9,845,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	29	04			Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	29	04	5	2	1 Belanja Pegawai	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	29	04	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	30				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	10,250,000.00	10,250,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	30	01			Pelayanan pemeliharaan kesehatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	30	01	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	30	03			Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	30	03	5	2	1 Belanja Pegawai	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	30	03	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	3,560,000.00	3,560,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31				Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	01			Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	01	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	03			Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	03	5	2	1 Belanja Pegawai	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	03	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	04			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
1.02	1.02.01	31	04	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
1.13	1.02.01	00	00	5	2	BELANJA LANGSUNG	236,000,000.00	266,483,000.00	30,483,000.00	12.92
1.13	1.02.01	15				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	95,000,000.00	131,983,000.00	36,983,000.00	38.93
1.13	1.02.01	15	8			Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	15	8	5	2	1 Belanja Pegawai	43,250,000.00	43,250,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	15	8	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	31,750,000.00	31,750,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	15	10			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut langgap cepat darurat dan kejadian luar biasa	20,000,000.00	33,233,000.00	13,233,000.00	66.17
1.13	1.02.01	15	10	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	33,233,000.00	13,233,000.00	66.17
1.13	1.02.01	15	11			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		23,750,000.00		
1.13	1.02.01	15	11	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa		23,750,000.00		
1.13	1.02.01	18				Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	18	03			Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	18	03	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	20				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	126,000,000.00	119,500,000.00	(6,500,000.00)	(5.16)
1.13	1.02.01	20	01			Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.13	1.02.01	20	01	5	2	1 Belanja Pegawai	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00

1						2	3	4	5 = 4-3	6	
1.13	1.02.01	20	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	02				Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	02	5	2	1	Belanja Pegawai	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	16,750,000.00	16,750,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	03				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	28,000,000.00	21,500,000.00	(6,500,000.00)	(23.
1.13	1.02.01	20	03	5	2	1	Belanja Pegawai	19,800,000.00	13,300,000.00	(6,500,000.00)	(32.
1.13	1.02.01	20	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	05				Fasilitas kerjasama usaha antara Pemda dengan organisasi/ lembaga sosial masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	05	5	2	1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	06				Pembinaan Karang Taruna	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	06	5	2	1	Belanja Pegawai	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.
1.13	1.02.01	20	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28,550,000.00	28,550,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	00	00	5	2		BELANJA LANGSUNG	383,329,000.00	609,378,500.00	226,049,500.00	58.
1.22	1.02.01	20					Program Penanggulangan Kemiskinan	383,329,000.00	609,378,500.00	226,049,500.00	58.
1.22	1.02.01	20	16				Perbaikan Gizi Penderita TBC Keluarga Miskin	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	17				Penimbangan Massal Balita Gakin	86,777,000.00	86,777,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	17	5	2	1	Belanja Pegawai	40,440,000.00	40,440,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	46,337,000.00	46,337,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	18				Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Buteki Keluarga Miskin	11,552,000.00	11,552,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	11,552,000.00	11,552,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	19				Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Balita Keluarga Miskin	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	19	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	20				Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	20	5	2	1	Belanja Pegawai	40,920,000.00	40,920,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	9,080,000.00	9,080,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	21				Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Keluarga Miskin	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	21	5	2	1	Belanja Pegawai	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	21	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	22				Pelaksanaan Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	22	5	2	1	Belanja Pegawai	24,850,000.00	24,850,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	23				Penanggulangan Infeksi Saluran Pemapasan Atas (ISPA) Keluarga Miskin	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	23	5	2	1	Belanja Pegawai	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	23	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	24				Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu Keluarga Miskin	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	25				Pelaksanaan Sunatan Massal Keluarga Miskin	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	25	5	2	1	Belanja Pegawai	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	25	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	26				Pembinaan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat Keluarga Miskin	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	26	5	2	1	Belanja Pegawai	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	26	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	27				Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	27	5	2	1	Belanja Pegawai	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	27	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	23,625,000.00	23,625,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	28				Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Luar Pantli Keluarga Miskin	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	28	5	2	1	Belanja Pegawai	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	28	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28,625,000.00	28,625,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	29				Pembinaan Anak Terlantar Luar Pantli Keluarga Miskin	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	29	5	2	1	Belanja Pegawai	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	29	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28,625,000.00	28,625,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	30				Pembinaan Keluarga Muda Mandiri dari Keluarga Miskin	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	30	5	2	1	Belanja Pegawai	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	30	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	0.
1.22	1.02.01	20	31				Pembinaan Keterampilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin	20,000,000.00	246,049,500.00	226,049,500.00	1,130.
1.22	1.02.01	20	31	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	246,049,500.00	226,049,500.00	1,130.
JUMLAH BELANJA								27,316,968,000.00	28,409,448,059.50	1,092,480,059.50	

Batusangkar, ¹⁶ November 2007

Mengesahkan,

Pjabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar

H.ADRION NURDAL, SE
NIP. 410 011 460

KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2008

: 1.02.01 Dinas Kesehatan dan Sosial

NOMOR REKUNING	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN DAERAH					
01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH					
01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	17.333.600,00	(282.666.400,00)	5,78	
01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	300.000.000,00	17.333.600,00	(282.666.400,00)	5,78	
	JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	17.333.600,00	(282.666.400,00)	5,78	
02 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	32.895.958.087,20	28.126.483.499,00	(4.763.598.788,20)	85,80	
02 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.201.833.787,20	18.456.202.899,00	(745.630.888,20)	96,12	
02 01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	19.201.833.787,20	18.456.202.899,00	(745.630.888,20)	96,12	
	BELANJA LANGSUNG	13.694.124.300,00	9.670.280.600,00	(4.017.967.900,00)	70,82	
02 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	13.694.124.300,00	9.670.280.600,00	(4.017.967.900,00)	70,82	
02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	937.376.500,00	875.773.630,00	(61.602.870,00)	93,43	
02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	86.571.500,00	65.508.155,00	(21.063.345,00)	75,67	
02 01 01 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	86.571.500,00	65.508.155,00	(21.063.345,00)	75,67	
02 01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
02 01 01 03 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.400.000,00	8.100.000,00	(1.300.000,00)	86,17	
02 01 01 07 5 2 1 X	Belanja Pegawai	9.400.000,00	8.100.000,00	(1.300.000,00)	86,17	
02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	19.994.800,00	(5.200,00)	99,97	
02 01 01 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.994.800,00	(5.200,00)	99,97	
02 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	19.999.975,00	(25,00)	100,00	
02 01 01 11 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.999.975,00	(25,00)	100,00	
02 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	2.488.000,00	(2.512.000,00)	49,76	
02 01 01 15 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.488.000,00	(2.512.000,00)	49,76	
02 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	14.995.200,00	(4.800,00)	99,97	
02 01 01 17 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.995.200,00	(4.800,00)	99,97	

01	REKENING	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
					Rp	%	
		2	3	4	5	6	7
01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85,000,000.00	84,759,000.00	(241,000.00)	99.72	
01	18 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000.00	84,759,000.00	(241,000.00)	99.72	
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	690,705,000.00	654,228,500.00	(36,476,500.00)	94.72	
01	19 5 2 1 X	Belanja Pegawai	690,705,000.00	654,228,500.00	(36,476,500.00)	94.72	
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,473,570,000.00	1,309,738,000.00	(163,832,000.00)	88.88	
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	42,770,000.00	42,641,000.00	(129,000.00)	99.70	
02	09 5 2 3	Belanja Modal	42,770,000.00	42,641,000.00	(129,000.00)	99.70	
02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1,300,000,000.00	1,136,522,000.00	(163,478,000.00)	87.42	
02	21 5 2 3	Belanja Modal	1,300,000,000.00	1,136,522,000.00	(163,478,000.00)	87.42	
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35,800,000.00	35,650,000.00	(150,000.00)	99.58	
02	22 5 2 3	Belanja Modal	35,800,000.00	35,650,000.00	(150,000.00)	99.58	
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85,000,000.00	84,925,800.00	(74,200.00)	99.91	
02	24 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000.00	84,925,800.00	(74,200.00)	99.91	#DIV/0!
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000.00	9,999,200.00	(800.00)	99.99	
02	28 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,999,200.00	(800.00)	99.99	
02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44,080,950.00	37,238,000.00	(6,842,950.00)	84.48	
02	05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	29,080,950.00	23,760,000.00	(5,320,950.00)	81.70	
02	05 01 5 2 1 X	Belanja Pegawai	29,080,950.00	23,760,000.00	(5,320,950.00)	81.70	
02	05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15,000,000.00	13,478,000.00	(1,522,000.00)	89.85	
02	05 02 5 2 1 X	Belanja Pegawai	9,300,000.00	7,855,000.00	(1,445,000.00)	84.46	
02	05 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,700,000.00	5,623,000.00	(77,000.00)	98.65	
02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000.00	24,502,500.00	(497,500.00)	98.01	
02	06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000.00	9,582,600.00	(417,400.00)	95.83	
02	06 01 5 2 1 X	Belanja Pegawai	4,230,000.00	3,830,000.00	(400,000.00)	90.54	
02	06 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,770,000.00	5,752,600.00	(17,400.00)	99.70	
02	06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15,000,000.00	14,919,900.00	(80,100.00)	99.47	
02	06 04 5 2 1 X	Belanja Pegawai	5,275,000.00	5,250,000.00	(25,000.00)	99.53	
02	06 04 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9,725,000.00	9,669,900.00	(55,100.00)	99.43	

NOMOR REKENING		URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
1	2				3	4	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	222,774,000.00	222,599,456.00	(174,544.00)	99.92	
01	15	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	120,000,000.00	119,999,056.00	(944.00)	100.00	
01	15	01 Belanja Barang dan Jasa	120,000,000.00	119,999,056.00	(944.00)	100.00	
		Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	75,774,000.00	75,718,000.00	(56,000.00)	99.93	
01	15	02 Belanja Pegawai	3,170,000.00	3,140,000.00	(30,000.00)	99.05	
01	15	02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa	72,604,000.00	72,578,000.00	(26,000.00)	99.96	
		Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan Terutama Untuk Penduduk Miskin	5,000,000.00	4,945,000.00	(55,000.00)	98.90	
01	15	03 Belanja Barang Dan Jasa	5,000,000.00	4,945,000.00	(55,000.00)	98.90	
01	15	03 5 2 2					
		Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	15,000,000.00	14,937,400.00	(62,600.00)	99.58	
01	15	04 Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,937,400.00	(62,600.00)	99.58	
01	15	04 5 2 2					
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00	
01	15	05 Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00	
01	15	05 5 2 2					
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	625,801,000.00	357,055,914.00	(268,745,086.00)	57.06	
01	16	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	49,750,000.00	46,091,400.00	(3,658,600.00)	92.65	
01	16	02 Belanja Pegawai	13,680,000.00	12,920,000.00	(760,000.00)	94.44	
01	16	02 5 2 1 Belanja Pegawai					
01	16	02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa	36,070,000.00	33,171,400.00	(2,898,600.00)	91.96	
		Pengadaan; peningkatan; dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	250,000,000.00	247,520,214.00	(2,479,786.00)	99.01	
01	16	03 Belanja Pegawai	20,350,000.00	19,750,000.00	(600,000.00)	97.05	
01	16	03 5 2 1 Belanja Pegawai					
01	16	03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa	226,620,000.00	224,770,214.00	(1,849,786.00)	99.18	
01	16	03 5 2 3 Belanja Modal	3,030,000.00	3,000,000.00	(30,000.00)	99.01	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	221,431,500.00	0.00	(221,431,500.00)	0.00	
01	16	09 Belanja Pegawai	178,450,000.00	0.00	(178,450,000.00)	0.00	
01	16	09 5 2 1 Belanja Pegawai					
01	16	09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa	42,981,500.00	0.00	(42,981,500.00)	0.00	
		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	48,310,000.00	12,123,000.00	(36,187,000.00)	25.09	
01	16	12 Belanja Pegawai	7,050,000.00	5,875,000.00	(1,175,000.00)	83.33	
01	16	12 5 2 1 Belanja Pegawai					
01	16	12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa	41,260,000.00	6,248,000.00	(35,012,000.00)	15.14	

REKENING						URAIAN	JUMLAH	REALISASI	Rp	%			
						2	3	4	5	6	7		
16	14					Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	8,200,000.00	6,950,000.00	(1,250,000.00)	84.76			
16	14	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	8,200,000.00	6,950,000.00	(1,250,000.00)	84.76			
16	15					Monitoring; evaluasi dan pelaporan	30,000,000.00	28,672,300.00	(1,327,700.00)	95.57			
16	15	5	2	1	X	Belanja Pegawai	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	100.00			
16	15	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	25,950,000.00	24,622,300.00	(1,327,700.00)	94.88			
16	16					Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di Masyarakat	18,109,500.00	15,699,000.00	(2,410,500.00)	86.69			
16	16	5	2	1	X	Belanja Pegawai	6,120,000.00	5,100,000.00	(1,020,000.00)	83.33			
16	16	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	11,989,500.00	10,599,000.00	(1,390,500.00)	88.40			
01	17					Program Pengawasan Obat dan Makanan	96,365,950.00	95,580,400.00	(785,550.00)	99.18			
01	17	01				Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	49,318,800.00	49,253,800.00	(65,000.00)	99.87			
01	17	01	5	2	1	X	Belanja Pegawai	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	100.00		
01	17	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	30,118,800.00	30,053,800.00	(65,000.00)	99.78		
02	17	02				Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	35,992,150.00	35,271,600.00	(720,550.00)	98.00			
02	17	02	5	2	1	X	Belanja Pegawai	6,791,000.00	6,791,000.00	0.00	100.00		
02	17	02	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	29,201,150.00	28,480,600.00	(720,550.00)	97.53		
02	17	04				Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	11,055,000.00	11,055,000.00	0.00	100.00			
02	17	04	5	2	1	X	Belanja Pegawai	9,890,000.00	9,890,000.00	0.00	100.00		
02	17	04	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	100.00		
1.02	01	19				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	265,315,900.00	229,798,300.00	(35,517,600.00)	86.61			
1.02	01	19	01			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	137,500,000.00	131,258,900.00	(6,241,100.00)	95.46			
1.02	01	19	01	5	2	1	X	Belanja Pegawai	41,480,000.00	41,480,000.00	0.00	100.00	
1.02	01	19	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	96,020,000.00	89,778,900.00	(6,241,100.00)	93.50	
1.02	01	19	02			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	31,680,500.00	27,780,000.00	(3,900,500.00)	87.69			
1.02	01	19	02	5	2	1	X	Belanja Pegawai	31,680,000.00	27,780,000.00	(3,900,000.00)	87.69	
1.02	01	19	02	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	500.00	0.00	(500.00)	0.00	
1.02	01	19	04			Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	51,475,400.00	46,845,600.00	(4,629,800.00)	91.01			
1.02	01	19	04	5	2	1	X	Belanja Pegawai	19,100,000.00	19,100,000.00	0.00	100.00	

NOMOR REKENING							URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN	
1	2	3	4	5	6	7							
01	19	04	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	32,375,400.00	27,745,600.00	(4,629,800.00)	85.70		
01	19	05					Monitoring; evaluasi dan pelaporan	44,660,000.00	23,913,800.00	(20,746,200.00)	53.55		
01	19	05	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	44,660,000.00	23,913,800.00	(20,746,200.00)	53.55		
01	20						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	50,960,000.00	33,862,400.00	(17,097,600.00)	66.45		
01	20	01					Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	50,960,000.00	33,862,400.00	(17,097,600.00)	66.45		
01	20	01	5	2	1	X	Belanja Pegawai	31,440,000.00	20,290,000.00	(11,150,000.00)	64.54		
01	20	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	19,520,000.00	13,572,400.00	(5,947,600.00)	69.53		
02	01	21					Program pengembangan lingkungan sehat	34,325,000.00	34,003,000.00	(322,000.00)	99.06		
02	01	21	01				Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	100.00		
02	01	21	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	100.00		
02	01	21	03				Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	2,835,000.00	2,835,000.00	0.00	100.00		
02	01	21	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2,835,000.00	2,835,000.00	0.00	100.00		
02	01	21	04				Monitoring; evaluasi dan pelaporan	30,000,000.00	29,678,000.00	(322,000.00)	98.93		
02	01	21	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	29,678,000.00	(322,000.00)	98.93		
02	01	22					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	325,260,000.00	253,099,500.00	(72,160,500.00)	77.81		
02	01	22	04				Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	68,675,000.00	67,191,200.00	(1,483,800.00)	97.84		
02	01	22	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	68,675,000.00	67,191,200.00	(1,483,800.00)	97.84		
02	01	22	05				Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	165,975,000.00	110,718,900.00	(55,256,100.00)	66.71		
02	01	22	05	5	2	1	X	Belanja Pegawai	25,750,000.00	15,750,000.00	(10,000,000.00)	61.17	
02	01	22	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	138,725,000.00	93,478,900.00	(45,246,100.00)	67.38		
02	01	22	05	5	2	3	Belanja Modal	1,500,000.00	1,490,000.00	(10,000.00)	99.33		
02	01	22	08				Peningkatan Imunisasi	51,620,000.00	48,260,800.00	(3,359,200.00)	93.49		
02	01	22	08	5	2	1	X	Belanja Pegawai	8,175,000.00	7,150,000.00	(1,025,000.00)	87.46	
02	01	22	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	39,335,000.00	37,003,800.00	(2,331,200.00)	94.07		
02	01	22	08	5	2	3	Belanja Modal	4,110,000.00	4,107,000.00	(3,000.00)	99.93		
1.02	01	22	09				Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	21,675,000.00	19,043,600.00	(2,631,400.00)	87.86		
1.02	01	22	09	5	2	1	X	Belanja Pegawai	2,200,000.00	2,075,000.00	(125,000.00)	94.32	
1.02	01	22	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	19,115,000.00	16,608,600.00	(2,506,400.00)	86.89		

NOMOR REKENING						URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
									Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									0.00	100.00	
22	09	5	2	3		Belanja Modal	360,000.00	360,000.00			
22	10					Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	17,315,000.00	7,885,000.00	(9,430,000.00)	45.54	
22	10	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	17,315,000.00	7,885,000.00	(9,430,000.00)	45.54	
01	23					Program standarisasi pelayanan kesehatan	92,031,900.00	84,360,200.00	(7,671,700.00)	91.66	
01	23	02				Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	71,231,900.00	64,464,300.00	(6,767,600.00)	90.50	
01	23	02	5	2	1	Belanja Pegawai	58,975,000.00	53,725,000.00	(5,250,000.00)	91.10	
01	23	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	12,256,900.00	10,739,300.00	(1,517,600.00)	87.62	
01	23	03				Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	5,000,000.00	4,870,000.00	(130,000.00)	97.40	
01	23	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	4,870,000.00	(130,000.00)	97.40	
02	01	23	06			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,800,000.00	15,025,900.00	(774,100.00)	95.10	
02	01	23	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15,800,000.00	15,025,900.00	(774,100.00)	95.10	
02	01	25				Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	8,665,087,200.00	5,487,189,900.00	(3,178,897,300.00)	63.32	
02	01	25	01			Pembangunan Puskesmas	1,024,187,200.00	1,024,187,200.00	0.00	100.00	
02	1.02.01	25	01	5	2	Belanja Modal	1,024,187,200.00	1,024,187,200.00	0.00	100.00	
02	01	25	02			Pembangunan Puskesmas Pembantu/polindes	1,420,000,000.00	1,278,603,000.00	(141,397,000.00)	90.04	
02	1.02.01	25	01	5	2	Belanja Modal	1,420,000,000.00	1,278,603,000.00	(141,397,000.00)	90.04	

KOR REKENING	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
				Rp	%	
	2	3	4	5	6	7
25 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	2,401,900,000.00	2,282,423,700.00	(119,476,300.00)	95.03	
25 07 5 2 3	Belanja Modal	2,401,900,000.00	2,282,423,700.00	(119,476,300.00)	95.03	
25 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keliling	130,000,000.00	0.00	(130,000,000.00)	0.00	
25 12 5 2 3	Belanja Modal	130,000,000.00	0.00	(130,000,000.00)	0.00	
25 12	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap	180,000,000.00	178,450,000.00	(1,550,000.00)	99.14	
25 12 5 2 3	Belanja Modal	180,000,000.00	178,450,000.00	(1,550,000.00)	99.14	
01 25 13	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas	630,000,000.00	559,710,000.00	(70,290,000.00)	88.84	
01 25 12 5 2 3	Belanja Modal	630,000,000.00	559,710,000.00	(70,290,000.00)	88.84	
01 25 14	Pemeliharaan rutin Berkala sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	2,850,000,000.00	133,921,000.00	(2,716,079,000.00)	4.70	
01 25 12 5 2 3	Belanja Modal	2,850,000,000.00	133,921,000.00	(2,716,079,000.00)	4.70	
1.02 01 25 15	Pemeliharaan rutin Berkala sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	30,000,000.00	29,895,000.00	(105,000.00)	99.65	
1.02 01 25 12 5 2 3	Belanja Modal	30,000,000.00	29,895,000.00	(105,000.00)	99.65	
1.02 01 29	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	65,000,000.00	27,956,200.00	(37,043,800.00)	43.01	
1.02 01 29 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	65,000,000.00	27,956,200.00	(37,043,800.00)	43.01	
1.02 01 29 01 5 2 1	Belanja Pegawai	7,620,000.00	7,620,000.00	0.00	100.00	
1.02 01 29 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	57,380,000.00	20,336,200.00	(37,043,800.00)	35.44	
1.02 01 30	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	8,710,000.00	8,304,700.00	405,300.00	95.35	
1.02 01 30 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	3,460,000.00	3,180,000.00	280,000.00	91.91	
1.02 01 30 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	3,460,000.00	3,180,000.00	280,000.00	91.91	
1.02 01 30 03	Pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan	5,250,000.00	5,124,700.00	(125,300.00)	97.61	
1.02 01 30 03 5 2 1	Belanja Pegawai	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	100.00	
1.02 01 30 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4,125,000.00	3,999,700.00	(125,300.00)	96.96	
1.02 01 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	70,365,400.00	69,766,400.00	(599,000.00)	99.15	
1.02 01 31 01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	35,135,400.00	35,123,400.00	(12,000.00)	99.97	

NOMOR REKENING							URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
										Rp	%	
									5	6	7	
01	31	01	5	2	1	X	Belanja Pegawai	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00	
01	31	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	32,735,400.00	32,723,400.00	(12,000.00)	99.96	
01	31	03	5	2	2		Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	21,555,000.00	21,555,000.00	0.00	100.00	
01	31	03	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	21,555,000.00	21,555,000.00	0.00	100.00	
01	31	04					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13,675,000.00	13,088,000.00	(587,000.00)	95.71	
01	31	04	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	13,675,000.00	13,088,000.00	(587,000.00)	95.71	
1.02.01	20						Program Pengelolaan Areal Pemakaman	30,000,000.00	25,508,300.00	(4,491,700.00)	85.03	
1.02.01	20	06					Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	30,000,000.00	25,508,300.00	(4,491,700.00)	85.03	
1.02.01	20	06	5	2	1	X	Belanja Pegawai	14,475,000.00	13,100,000.00	(1,375,000.00)	90.50	
1.02.01	20	06	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	14,325,000.00	11,208,300.00	(3,116,700.00)	78.24	
1.02.01	20	06	5	2	3		Belanja Modal	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	
1.02.01	16						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	35,000,000.00	20,467,400.00	(9,467,400.00)	58.48	
1.02.01	16	10					Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	35,000,000.00	20,467,400.00	(9,467,400.00)	58.48	
1.02.01	16	08	5	2	1	X	Belanja Pegawai	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	0.00	
1.02.01	16	10	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	23,000,000.00	20,467,400.00	2,532,600.00	88.99	
1.02.01	19						Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	14,450,000.00	14,400,000.00	(50,000.00)	99.65	
1.02.01	19	03					Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	14,450,000.00	14,400,000.00	(50,000.00)	99.65	
1.02.01	19	03	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	13,900,000.00	13,850,000.00	(50,000.00)	99.64	
1.02.01	19	03	5	2	3		Belanja Modal	550,000.00	550,000.00	0.00	100.00	
1.02.01	21						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	37,000,000.00	27,063,000.00	(9,937,000.00)	73.14	
1.02.01	21	01					Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	6,000,000.00	5,090,000.00	(910,000.00)	84.83	
1.02.01	21	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	5,090,000.00	(910,000.00)	84.83	
1.02.01	21	02					Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	6,000,000.00	5,405,000.00	(595,000.00)	90.08	
1.02.01	21	02	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	5,405,000.00	(595,000.00)	90.08	

REKENING	URAIAN					JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
								Rp	%	
								5	6	
2	3	4	5	6	7					
03						Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	12,500,000.00	10,058,000.00	(2,442,000.00)	80.46
03	5	2	1	X		Belanja Pegawai	9,880,000.00	9,280,000.00	(600,000.00)	93.93
03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2,620,000.00	778,000.00	(1,842,000.00)	29.69
06						Pembinaan Karang Taruna	12,500,000.00	6,510,000.00	(5,990,000.00)	52.08
05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	12,500,000.00	6,510,000.00	(5,990,000.00)	52.08
20						Program Penanggulangan Kemiskinan	574,650,500.00	432,013,400.00	(142,637,100.00)	75.18
20	17					Penimbangan Massal Balita Gakin	69,365,000.00	69,560,000.00	(9,805,000.00)	85.86
20	17	5	2	1	X	Belanja Pegawai	33,820,000.00	30,520,000.00	(3,300,000.00)	90.24
20	17	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	35,545,000.00	29,040,000.00	(6,505,000.00)	81.70
20	18					Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Buteki Keluarga Miskin	9,750,000.00	6,634,000.00	(3,116,000.00)	68.04
20	18	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	9,750,000.00	6,634,000.00	(3,116,000.00)	68.04
20	19					Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Balita Keluarga Miskin	30,000,000.00	29,779,000.00	(221,000.00)	99.26
20	19	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	29,779,000.00	(221,000.00)	99.26
20	20					Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	36,000,000.00	29,001,050.00	(6,998,950.00)	80.56
20	20	5	2	1	X	Belanja Pegawai	27,620,000.00	21,520,000.00	(6,100,000.00)	77.91
20	20	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	8,380,000.00	7,481,050.00	(898,950.00)	89.27
20	21					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Keluarga Miskin	20,370,500.00	9,117,500.00	(11,253,000.00)	44.76
20	21	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	20,370,500.00	9,117,500.00	(11,253,000.00)	44.76
20	22					Pelaksanaan Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin	30,000,000.00	29,900,000.00	(100,000.00)	99.67
20	22	5	2	1	X	Belanja Pegawai	24,850,000.00	24,850,000.00	0.00	100.00
20	22	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	5,150,000.00	5,050,000.00	(100,000.00)	98.06
20	23					Penanggulangan Infeksi Saluran Pemapasan Atas (ISPA) Keluarga Miskin	2,000,000.00	410,000.00	(1,590,000.00)	20.50
20	23	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	410,000.00	(1,590,000.00)	20.50
20	24					Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu Keluarga Miskin	3,800,000.00	2,615,000.00	(1,185,000.00)	68.82
20	24	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	3,800,000.00	2,615,000.00	(1,185,000.00)	68.82
20	25					Pelaksanaan Sunatan Massal Keluarga Miskin	19,925,000.00	19,076,800.00	(848,200.00)	95.74

1	2	3	4	BERTAMBAH/ BERKURANG		7
				5	6	
1.01.20.25.5.2.1	Belanja Pegawai	6,980,000.00	6,980,000.00	0.00	100.00	
1.01.20.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,945,000.00	12,096,800.00	(848,200.00)	93.45	
1.02.01.20.26	Pembinaan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat Keluarga Miskin	80,000,000.00	46,552,400.00	(33,447,600.00)	58.19	
1.02.01.20.26.5.2.1.X	Belanja Pegawai	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	100.00	
1.02.01.20.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,800,000.00	37,352,400.00	(33,447,600.00)	52.76	
1.02.01.20.27	Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	29,380,000.00	27,499,000.00	(1,881,000.00)	93.60	
1.02.01.20.27.5.2.1.X	Belanja Pegawai	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	100.00	
1.02.01.20.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,830,000.00	24,949,000.00	(1,881,000.00)	92.99	
1.02.01.20.28	Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Luar Panti Keluarga Miskin	49,250,000.00	48,933,500.00	(316,500.00)	99.36	
1.02.01.20.28.5.2.1.X	Belanja Pegawai	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	100.00	
1.02.01.20.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,300,000.00	46,983,500.00	(316,500.00)	99.33	
1.02.01.20.29	Pembinaan Anak Terlantar Luar Panti Keluarga Miskin	50,000,000.00	48,006,900.00	(1,993,100.00)	96.01	
1.02.01.20.29.5.2.1.X	Belanja Pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00	
1.02.01.20.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,500,000.00	45,506,900.00	(1,993,100.00)	95.80	
1.02.01.20.29.5.2.3	Belanja Modal	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	
1.02.01.20.31	Pembinaan Keterampilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin	109,810,000.00	44,918,300.00	(64,891,700.00)	40.91	
1.02.01.20.30.5.2.1.X	Belanja Pegawai	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	0.00	
1.02.01.20.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,810,000.00	44,918,300.00	(4,891,700.00)	90.18	
1.02.01.20.29	Akses Jaminan Sosial	35,000,000.00	30,009,950.00	(4,990,050.00)	85.74	
1.02.01.20.29.5.2.1.X	Belanja Pegawai	4,300,000.00	1,975,000.00	(2,325,000.00)	45.93	
1.02.01.20.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,700,000.00	28,034,950.00	(2,665,050.00)	91.32	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Unit Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	803.899.750,00	278.092.706,00	(525.807.044,00)	34,59	Perda Nomor 9 Tahun 2004
1.02.1.02.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	803.899.750,00	278.092.706,00	(525.807.044,00)	34,59	
1.02.1.02.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	803.899.750,00	278.092.706,00	(525.807.044,00)	34,59	
1.02.1.02.01.01.00.00.5	BELANJA	33.911.840.455,62	31.579.789.419,00	(2.332.051.036,62)	93,12	PP No. 10 Tahun 2008
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.033.923.318,62	20.910.905.631,00	(1.123.017.687,62)	94,90	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	22.033.923.318,62	20.910.905.631,00	(1.123.017.687,62)	94,90	
1.02.1.02.01.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	11.877.917.137,00	10.668.883.788,00	(1.209.033.349,00)	89,82	
1.02.1.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.206.200.000,00	1.100.099.398,00	(106.100.602,00)	91,20	
1.02.1.02.01.01.01.02	<i>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</i>	150.000.000,00	108.771.433,00	(41.228.567,00)	72,51	
1.02.1.02.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	108.771.433,00	(41.228.567,00)	72,51	
1.02.1.02.01.01.01.07	<i>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</i>	15.000.000,00	12.725.000,00	(2.275.000,00)	84,83	
1.02.1.02.01.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	12.725.000,00	(2.275.000,00)	84,83	
1.02.1.02.01.01.01.10	<i>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</i>	60.000.000,00	59.387.000,00	(613.000,00)	98,98	
1.02.1.02.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.387.000,00	(613.000,00)	98,98	
1.02.1.02.01.01.01.11	<i>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</i>	100.000.000,00	98.235.675,00	(1.764.325,00)	98,24	
1.02.1.02.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.235.675,00	(1.764.325,00)	98,24	
1.02.1.02.01.01.01.13	<i>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</i>	25.000.000,00	24.375.700,00	(624.300,00)	97,50	
1.02.1.02.01.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.375.700,00	(624.300,00)	97,50	
1.02.1.02.01.01.01.15	<i>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</i>	3.000.000,00	2.185.000,00	(815.000,00)	72,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.185.000,00	(815.000,00)	72,83	
1.02.1.02.01.01.01.17	<i>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</i>	60.000.000,00	54.315.590,00	(5.684.410,00)	90,53	
1.02.1.02.01.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	54.315.590,00	(5.684.410,00)	90,53	
1.02.1.02.01.01.01.18	<i>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</i>	250.000.000,00	245.154.000,00	(4.846.000,00)	98,06	
1.02.1.02.01.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	245.154.000,00	(4.846.000,00)	98,06	
1.02.1.02.01.01.01.19	<i>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN</i>	543.200.000,00	494.950.000,00	(48.250.000,00)	91,12	
1.02.1.02.01.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	543.200.000,00	494.950.000,00	(48.250.000,00)	91,12	
1.02.1.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.767.000.000,00	1.651.424.450,00	(115.575.550,00)	93,46	
1.02.1.02.01.01.02.07	<i>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</i>	18.500.000,00	15.930.900,00	(2.569.100,00)	86,11	
1.02.1.02.01.01.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.980.900,00	(2.519.100,00)	44,02	
1.02.1.02.01.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	14.000.000,00	13.950.000,00	(50.000,00)	99,64	
1.02.1.02.01.01.02.22	<i>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</i>	41.000.000,00	40.840.000,00	(160.000,00)	99,61	
1.02.1.02.01.01.02.22.5.2.3	Belanja Modal	41.000.000,00	40.840.000,00	(160.000,00)	99,61	
1.02.1.02.01.01.02.24	<i>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</i>	175.000.000,00	165.605.550,00	(9.394.450,00)	94,63	
1.02.1.02.01.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	165.605.550,00	(9.394.450,00)	94,63	
1.02.1.02.01.01.02.26	<i>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</i>	7.500.000,00	7.185.000,00	(315.000,00)	95,80	
1.02.1.02.01.01.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.185.000,00	(315.000,00)	95,80	
1.02.1.02.01.01.02.41	<i>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS</i>	1.525.000.000,00	1.421.863.000,00	(103.137.000,00)	93,24	
1.02.1.02.01.01.02.41.5.2.3	Belanja Modal	1.525.000.000,00	1.421.863.000,00	(103.137.000,00)	93,24	
1.02.1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	67.897.936,00	67.785.000,00	(112.936,00)	99,83	
1.02.1.02.01.01.05.01	<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</i>	67.897.936,00	67.785.000,00	(112.936,00)	99,83	
1.02.1.02.01.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.897.936,00	67.785.000,00	(112.936,00)	99,83	
1.02.1.02.01.01.05.02	<i>SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.05.02.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.05.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	14.917.500,00	(82.500,00)	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.01.06.01	<i>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</i>	7.500.000,00	7.432.500,00	(67.500,00)	99,10	
1.02.1.02.01.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.032.500,00	(67.500,00)	98,35	
1.02.1.02.01.01.06.04	<i>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</i>	7.500.000,00	7.485.000,00	(15.000,00)	99,80	
1.02.1.02.01.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	2.510.000,00	(15.000,00)	99,41	
1.02.1.02.01.01.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	182.965.000,00	182.939.350,00	(25.650,00)	99,99	
1.02.1.02.01.01.15.01	<i>PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</i>	142.965.000,00	142.964.850,00	(150,00)	100,00	
1.02.1.02.01.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.965.000,00	142.964.850,00	(150,00)	100,00	
1.02.1.02.01.01.15.02	<i>PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</i>	40.000.000,00	39.974.500,00	(25.500,00)	99,94	
1.02.1.02.01.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3.170.000,00	3.150.000,00	(20.000,00)	99,37	
1.02.1.02.01.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.830.000,00	36.824.500,00	(5.500,00)	99,99	
1.02.1.02.01.01.15.04	<i>PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.05	<i>PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.06	<i>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.393.723.058,00	793.006.300,00	(600.716.758,00)	56,90	
1.02.1.02.01.01.16.03	<i>PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA</i>	360.000.000,00	349.778.500,00	(10.221.500,00)	97,16	
1.02.1.02.01.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.750.000,00	322.528.500,00	(10.221.500,00)	96,93	
1.02.1.02.01.01.16.11	<i>PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN</i>	20.000.000,00	19.977.900,00	(22.100,00)	99,89	
1.02.1.02.01.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.977.900,00	(22.100,00)	99,89	
1.02.1.02.01.01.16.12	<i>PENYEDIAAN BIAYA OPERASTONAL DAN PEMELIHARAAN</i>	1.008.723.058,00	419.209.900,00	(589.513.158,00)	41,56	
1.02.1.02.01.01.16.12.5.2.1	Belanja Pegawai	1.008.723.058,00	419.209.900,00	(589.513.158,00)	41,56	
1.02.1.02.01.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.01.16.26	PENGADAAN BUKU KIA DAN STIKER IBU HAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.16.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.16.27	UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA PELAKSANAAN KB-KES, PKK, TMKK, IBI, BHAYANGKARA	5.000.000,00	4.040.000,00	(960.000,00)	80,80	
1.02.1.02.01.01.16.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.040.000,00	(960.000,00)	80,80	
1.02.1.02.01.01.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	25.500.000,00	25.499.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.02.1.02.01.01.17.01	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.17.02	PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	25.500.000,00	25.499.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.02.1.02.01.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.499.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.02.1.02.01.01.17.02.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.17.04	PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.17.04.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.17.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	112.250.000,00	111.980.540,00	(269.460,00)	99,76	
1.02.1.02.01.01.19.01	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	13.000.000,00	12.930.000,00	(70.000,00)	99,46	
1.02.1.02.01.01.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.930.000,00	(70.000,00)	99,46	
1.02.1.02.01.01.19.02	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	89.250.000,00	89.175.000,00	(75.000,00)	99,92	
1.02.1.02.01.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	89.175.000,00	(75.000,00)	99,92	
1.02.1.02.01.01.19.04	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.19.04.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.19.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.19.05	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10.000.000,00	9.875.540,00	(124.460,00)	98,76	
1.02.1.02.01.01.19.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.875.540,00	(124.460,00)	98,76	
1.22.1.02.01.01.20	PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN	70.000.000,00	66.863.750,00	(3.136.250,00)	95,52	
1.22.1.02.01.01.20.21	PENINGKATAN PELAYANAN & PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN KELUARGA MISKIN	20.000.000,00	19.950.500,00	(49.500,00)	99,75	
1.22.1.02.01.01.20.21.5.2.1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		REALISASI	(Rp)	Bertambah / Berkurang	DASAR HUKUM
		3	4				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
1.22.102.01.01.20.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.725.000,00	18.675.500,00	(49.500,00)	99,74		
1.22.102.01.01.20.22.5.2.1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	21.700.000,00	(2.800.000,00)	88,57		
1.22.102.01.01.20.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.456.750,00	(43.250,00)	99,21		
1.22.102.01.01.20.25	PELAKSANAAN SUNATAN MASSAL KELUARGA MISKIN	20.000.000,00	19.756.500,00	(243.500,00)	98,78		
1.22.102.01.01.20.25.5.2.1	Belanja Pegawai	7.980.000,00	7.960.000,00	(20.000,00)	99,75		
1.22.102.01.01.20.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.020.000,00	11.796.500,00	(223.500,00)	98,14		
1.22.102.01.01.20.49	PENANGANAN NEONATUS RESTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.102.01.01.20.49.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	42.500.000,00	38.890.650,00	(3.609.350,00)	91,51		
1.02.102.01.01.20.03	PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKTIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	30.000.000,00	29.110.450,00	(889.550,00)	97,03		
1.02.102.01.01.20.03.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00		
1.02.102.01.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	28.260.450,00	(889.550,00)	96,95		
1.02.102.01.01.20.04	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.04.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.07	FEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.08	PEMANTAUAN STATUS GIZI	12.500.000,00	9.780.200,00	(2.719.800,00)	78,24		
1.02.102.01.01.20.08.5.2.1	Belanja Pegawai	6.225.000,00	6.090.000,00	(135.000,00)	97,83		
1.02.102.01.01.20.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	3.690.200,00	(2.584.800,00)	58,81		
1.02.102.01.01.20.09	UPAYA PERBAIKAN GIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.10	PEMANTAUAN KONSUMSI GIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.10.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.10.5.2.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.10.5.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.102.01.01.20.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	7.500.000,00	6.974.000,00	(526.000,00)	92,99		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.1.02.01.01.21.01	PENKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	7.500.000,00	6.974.000,00	(526.000,00)	92,99	
1.02.1.02.01.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.974.000,00	(526.000,00)	92,99	
1.02.1.02.01.01.21.03	SOSIALISASI KEHLIAKAN LINGKUNGAN SEHAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.21.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.21.04	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.21.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.22	PROGRAM Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	217.664.550,00	198.304.400,00	(19.360.150,00)	91,11	
1.02.1.02.01.01.22.04	PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH	27.000.000,00	19.202.000,00	(7.798.000,00)	71,12	
1.02.1.02.01.01.22.04.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	875.000,00	(225.000,00)	79,55	
1.02.1.02.01.01.22.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.940.000,00	16.792.000,00	(6.148.000,00)	73,20	
1.02.1.02.01.01.22.04.5.2.3	Belanja Modal	2.960.000,00	1.535.000,00	(1.425.000,00)	51,86	
1.02.1.02.01.01.22.05	PELAYANAN Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	150.000.000,00	140.003.000,00	(9.997.000,00)	93,34	
1.02.1.02.01.01.22.05.5.2.1	Belanja Pegawai	42.525.000,00	41.900.000,00	(625.000,00)	98,53	
1.02.1.02.01.01.22.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.325.000,00	95.988.000,00	(9.337.000,00)	91,14	
1.02.1.02.01.01.22.05.5.2.3	Belanja Modal	2.150.000,00	2.115.000,00	(35.000,00)	98,37	
1.02.1.02.01.01.22.09	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH	20.000.000,00	19.109.750,00	(890.250,00)	95,55	
1.02.1.02.01.01.22.09.5.2.1	Belanja Pegawai	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.425.000,00	17.574.750,00	(850.250,00)	95,39	
1.02.1.02.01.01.22.09.5.2.3	Belanja Modal	600.000,00	560.000,00	(40.000,00)	93,33	
1.02.1.02.01.01.22.10	PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	20.664.550,00	19.989.650,00	(674.900,00)	96,73	
1.02.1.02.01.01.22.10.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	90,91	
1.02.1.02.01.01.22.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.564.550,00	18.989.650,00	(574.900,00)	97,06	
1.02.1.02.01.01.23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	282.300.000,00	262.209.750,00	(20.090.250,00)	92,88	
1.02.1.02.01.01.23.02	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	234.550.000,00	219.831.700,00	(14.718.300,00)	93,72	
1.02.1.02.01.01.23.02.5.2.1	Belanja Pegawai	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.23.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.725.000,00	194.706.700,00	(14.018.300,00)	93,28	
1.02.1.02.01.01.23.02.5.2.3	Belanja Modal	19.750.000,00	19.050.000,00	(700.000,00)	96,46	
1.02.1.02.01.01.23.06	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	11.550.000,00	11.384.000,00	(166.000,00)	98,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.294.000,00	(106.000,00)	98,87	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000,00	540.000,00	(60.000,00)	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07	REGISTRASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SERTA PERIZINAN TENAGA DAN SARANA KESEHATAN YANG ADA DI LEMBAGA KESEHATAN PEMERINTAH DAN SWASTA	11.200.000,00	11.120.800,00	(79.200,00)	99,29	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.920.800,00	(79.200,00)	99,21	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08	PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL	15.000.000,00	10.045.000,00	(4.955.000,00)	66,97	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.095.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09	PENYUSUNAN DATA KEPEGAWAIAN INVENTARIS DAN SARANA PERALATAN KESEHATAN	10.000.000,00	9.828.250,00	(171.750,00)	98,28	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.828.250,00	(171.750,00)	98,28	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	5.000.000,00	4.855.000,00	(145.000,00)	97,10	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01	PELAYANAN OPERASI KATARAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 10	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	5.000.000,00	4.855.000,00	(145.000,00)	97,10	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	4.095.000,00	(145.000,00)	96,58	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	6.431.500.000,00	6.097.507.600,00	(333.992.400,00)	94,81	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 02	PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU	1.600.000.000,00	1.535.379.000,00	(64.621.000,00)	95,96	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	1.535.379.000,00	(64.621.000,00)	95,96	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU	2.301.500.000,00	2.243.867.800,00	(57.632.200,00)	97,50	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.301.500.000,00	2.243.867.800,00	(57.632.200,00)	97,50	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KELILING	280.000.000,00	272.505.000,00	(7.495.000,00)	97,32	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	280.000.000,00	272.505.000,00	(7.495.000,00)	97,32	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 20	REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBANTU	2.250.000.000,00	2.045.755.800,00	(204.244.200,00)	90,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.250.000.000,00	2.045.755.800,00	(204.244.200,00)	90,92	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	22.500.000,00	20.929.100,00	(1.570.900,00)	93,02	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 08	<i>REVIEW STIMULASI DETEKSI DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG</i>	10.000.000,00	9.195.700,00	(804.300,00)	91,96	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	8.070.700,00	(804.300,00)	90,94	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 09	<i>PELATIHAN PELAKSANAAN MANAJEMEN ASFIKZIA</i>	12.500.000,00	11.733.400,00	(766.600,00)	93,87	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.775.000,00	10.008.400,00	(766.600,00)	92,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	5.000.000,00	4.070.000,00	(930.000,00)	81,40	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01	<i>PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN</i>	5.000.000,00	4.070.000,00	(930.000,00)	81,40	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.070.000,00	(930.000,00)	81,40	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 08	<i>PENGADAAN KMS LANSIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	7.500.000,00	7.438.000,00	(62.000,00)	99,17	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 01	<i>PENGAWASAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL INDUSTRI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 03	<i>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN RESTAURANT</i>	7.500.000,00	7.438.000,00	(62.000,00)	99,17	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.438.000,00	(62.000,00)	99,17	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	10.916.593,00	8.210.000,00	(2.706.593,00)	75,21	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 01	<i>PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU</i>	10.916.593,00	8.210.000,00	(2.706.593,00)	75,21	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.916.593,00	8.210.000,00	(2.706.593,00)	75,21	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 05	<i>PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN (PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN)</i>	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	2.340.000,00	(20.000,00)	99,15	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.107.940.705,62)	(31.301.696.713,00)	1.806.243.992,62	94,54	

BATUSANGKAR, 2010
BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE